



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 117 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

MATRIKS PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2026



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PRIORITAS NASIONAL 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
01 PN: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	01 - Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	01- Indeks Demokrasi Indonesia		79,81	82,12–85,66	489.771,66	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02- Indeks Hak Asasi Manusia		2,70 (2023)	2,80		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	01 - Menguatnya Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	01- Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan		76,86	84,56–88,20	199.239,88	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02- Indeks Aktualisasi Pancasila		77,73 (2023)	80,15		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
01.01.01 KP: Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara	01 - Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi	01- Jaminan Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpengadapan oleh Aparat Negara		84,97	82,89–87,57	89.665,53	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Pancasila bagi Penyelenggara Negara	02- Persentase Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	persen	0	50,00		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
01.01.02 KP: Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	01 - Meningkatnya Kohesivitas Sosial dan Keharmonisan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Berwawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Pancasila	01- Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa		78,32 (2023)	81,00	95.950,00	122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		02- Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		81,46 (2023)	84,00		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		03- Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia		81,18 (2023)	84,00		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		04- Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan		79,35 (2023)	82,00		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia		68,33 (2023)	71,00		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		06- Persentase Konten Komunikasi Publik yang Dapat Memperkuat Kohesivitas Sosial Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	persen	0	80,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah	01 - Meningkatnya Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Tingkat Daerah	01- Performa Pimpinan Tingkat Pusat dan Daerah dalam Membina Ketahanan Nasional		82,88 (2023)	85,88-90,41	13.624,35	064 - Lembaga Ketahanan Nasional
01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	01 - Terciptanya Ekosistem Komunikasi, Kebebasan Pers dan Media Massa yang Berintegritas	01- Indeks Kemerdekaan Pers		69,36	70,50	107.149,04	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02- Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75,65	76,25		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03- Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		69,80 (2023)	72,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
01.02.01 KP: Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	01 - Terwujudnya Kebebasan Pers dan Media Massa yang Berintegritas, Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri	01- Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku		3,22	3,20	77.149,04	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02- Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers	persen	65,80	66,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03- Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	persen	65,69	66,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		04- Persentase Jumlah Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik	persen	63,74	64,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05- Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers	persen	70,12	71,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06- Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan	persen	69,08	70,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		07- Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers	orang	2.015	1.887		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.02 KP: Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	01 - Terbangunnya Sistem Komunikasi dan Jaminan Kesetaraan Hak Masyarakat Atas Informasi Publik	01- Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi SKPN	dokumen	11	3	30.000,00	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02- Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital	orang	141.300	200.300		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03- Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat	persen	77,48	77,98		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		04- Persentase Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	persen	75,68	77,98		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05- Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik	persen	76,25	76,75		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		06- Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik	persen	79,92	80,42		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		07- Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik	persen	76,33	76,83		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya Lembaga Demokrasi yang Kokoh Sebagai Pilar Demokrasi untuk Mewujudkan Demokrasi Substansial	01- Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		79,48	79,88-83,32	18.038,23	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
01.03.01 KP: Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	01 - Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Semakin Meningkatkan sebagai Pilar Demokrasi	01- Kinerja Lembaga Legislatif dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi		63,18	55,99-59,23	18.038,23	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
01.03.02 KP: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya Kinerja Penyelenggara Pemilu yang Semakin Meningkat dalam Mendukung Demokrasi Prosedural Menuju Demokrasi Substansial	01- Persentase Hasil Penindakan Pelanggaran Pemilu yang Cepat, Tanpa Biaya, Aksesibel, Mudah Dimengerti, dan Akuntabel	persen	0	0	0	115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	01 - Terwujudnya Partisipasi Bermakna Masyarakat Sipil melalui Jaminan Kesetaraan Masyarakat	01- Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan		82,51	81,98–85,51	75.800,00	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
01.04.01 KP: Penyediaan Dana Abadi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Terwujudnya Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dalam Menjalankan Peran Advokasi, Pemberdayaan, dan Kontrol Sosial	01- Jumlah Daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan Berkategori Baik	daerah	0	14	4.750,00	010 - Kementerian Dalam Negeri
01.04.02 KP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik	01 - Terwujudnya Penguatan Jaminan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik untuk Menjalankan	01- Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	orang	0	69.125	71.050,00	076 - Komisi Pemilihan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Peran Pemberdayaan dan Kontrol Sosial	02- Jumlah Kader Pengawas yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	orang	900	19.355		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
01.05 PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	01 - Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Berperspektif HAM serta Perlindungan HAM Terutama tapi Tidak Terbatas pada Kelompok Rentan.	01- Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		2,60 (2023)	2,70	89.544,52	136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02- Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		2,80 (2023)	2,90		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.05.01 KP: Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender	01 - Terwujudnya Kebijakan dan Kelembagaan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, Humanis, Inklusif, dan Gender.	01- Persentase K/L/D dan Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan HAM	persen	0	50,25	54.300,00	136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02- Jumlah Kebijakan Diskriminatif yang Ditindaklanjuti	kebijakan	10	10		074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
01.05.02 KP: Perlindungan Hak Asasi	01 - Terwujudnya Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik	01- Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM	persen	37,60 (2023)	40,60	35.244,52	074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi	Diskriminasi terutama Tapi Tidak Terbatas pada Kelompok Rentan	02- Persentase Capaian Aksi RANHAM	persen	83,47	60,00		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia

**CATATAN:**

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02 PN: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01 - Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	01- Asia Power Index (Diplomatic Influence)		65,6	65,8	209.901.355,24	011 - Kementerian Luar Negeri
		02- Asia Power Index (Military Capability)		15,70	17,00		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		03- Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	persen	62,8 (2020)	68		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		04- Global Cybersecurity Index		100,00	95,00		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		05- Indeks Keamanan Laut Nasional		59,00	61,00		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)	01- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		71,20	75,40		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
		02- Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan	persen	0,67	2,8-3,1		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	03 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)	01- Indeks Ketahanan Energi		6,64	6,82		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)	01- Indeks Ketahanan Air Nasional		3,48 (2022)	3,50		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05 - Terwujudnya perekonomian Nasional yang inklusif dan berkelanjutan		01- Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI)	peringkat	3 (2023)	3		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02- Indonesia Blue Economy Index (IBEI)		34,25 (2023)	41,26		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		03- Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	peringkat	43	41		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
06 - Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau		01- Indeks Ekonomi Hijau		60,37 (2023)	71,8		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		73,53	76,67		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03- Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,35 (2020)	0,47		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	01 - Terwujudnya Pondasi Kemampuan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	01- Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI	persen	30,30	40,00	32.441.532,72	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.01 KP: Melanjutkan Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI	01 - Terwujudnya Kelanjutan Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI	01- Persentase Pemenuhan Alutsista	persen	30,30	40,00	26.541.823,07	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.02 KP: Meningkatkan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terwujudnya Peningkatkan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar	01- Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa	persen	51,30	35,00	321.482,12	012 - Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.01.03 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi dan Memperkuat Kapabilitas Badan Pertahanan Siber	01 - Terwujudnya Penguatan Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi dan Memperkuat Kapabilitas Badan Pertahanan Siber	01- Persentase Pemenuhan Peralatan Siber	persen	67,50	70,00	14.084,28	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01- Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas	persen	69,42	71,15	1.959.989,12	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.05 KP: Meningkatkan Kesiapan Alpalhankam melalui Pemeliharaan dan Perawatan	01 - Terwujudnya Peningkatan Kesiapan Alpalhankam melalui Pemeliharaan dan Perawatan	01- Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista	persen	49,70	52,30	3.604.154,14	012 - Kementerian Pertahanan
02.02 PP: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Terwujudnya Industri Pertahanan yang Sehat, Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing	01- Ranking Industri Pertahanan (SIPRI top 100)	peringkat	>100	100	24.442.387,45	012 - Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.02.01 KP: Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri	01 - Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri	01- Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan	persen	60,00	76,00	230.299,00	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.02 KP: Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri	01 - Terwujudnya Pningkatan Komitmen untuk Menggunakan Produk-produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri	01- Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan	persen	100,00	100,00	3.687.798,76	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.03 KP: Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest	01 - Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest	01- Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri	persen	50,00	70,00	20.524.289,70	012 - Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.03 PP: Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	01 - Terwujudnya Penguatan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	01- Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan	persen	100,00	100,00	118.337,31	012 - Kementerian Pertahanan
02.03.01 KP: Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Memperkuat Komponen Cadangan	01 - Terwujudnya Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Memperkuat Komponen Cadangan	01- Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk	persen	(indikator baru)	30,00	108.087,31	012 - Kementerian Pertahanan
		02- Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik	persen	100,00	100,00		012 - Kementerian Pertahanan
02.03.02 KP: Pembinaan Komponen Pendukung untuk Penguatan Pertahanan Negara	01 - Terwujudnya Pembinaan Komponen Pendukung untuk Penguatan Pertahanan Negara	01- Persentase Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	persen	(indikator baru)	100,00	10.250,00	012 - Kementerian Pertahanan
02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya Sistem Deteksi Dini yang Mampu Mendukung Keamanan Negara	01- Fragile State Index		63,70	61,90	245.265,32	050 - Badan Intelijen Negara
		02- Global Terrorism Index		3,99	3,91		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.04.01 KP: Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, Serta Paham Kebhinekaan di Daerah-daerah yang Rawan Konflik Serta Rentan Isu Separatisme	01 - Terwujudnya Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, Serta Paham Kebhinekaan di Daerah-daerah yang Rawan Konflik Serta Rentan Isu Separatisme	01- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan	kegiatan	(indikator baru)	5	1.750,00	010 - Kementerian Dalam Negeri
02.04.02 KP: Penguatan Kapabilitas Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya Penguatan Kapabilitas Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Dalam Negeri	01- Cakupan Deteksi Dini Intelijen	persen	(indikator baru)	100,00	243.515,32	050 - Badan Intelijen Negara
02.04.03 KP: Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme	01 - Meningkatnya Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme	01- Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	persen	(indikator baru)	100,00	0,00	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.04.04 KP: Penguatan Kontra Radikalisasi	01 - Terwujudnya Penguatan Kontra Radikalisasi	01- Indeks Risiko Terorisme (Target)		51,97 (2023)	51,67		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.05 KP: Penguatan Deradikalisasi Terorisme	01 - Terwujudnya Penguatan Deradikalisasi Terorisme	01- Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)		30,01	29,81		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.06 KP: Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	01 - Terwujudnya Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	01- Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	persen	(indikator baru)	50,00		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya Interaksi dan Transaksi Siber, Persandian, dan Sinyal yang Aman	01- Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber		(indikator baru)	0,73	2.345.413,40	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.01 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi	01 - Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Nasional	01- Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi	persen	(indikator baru)	50,00	2.343.987,20	051 - Badan Siber dan Sandi Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.05.02 KP: Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terpenuhiya SDM Keamanan Siber dan Sandi Nasional	01- Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi	persen	(indikator baru)	14,00	0,00	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.03 KP: Penguatan Kelembagaan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya Kelembagaan Keamanan Siber dan Sandi Nasional	01- Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE		2,59	2,94		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
		02- Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian		(indikator baru)	3,20		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.04 KP: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis	01 - Terwujudnya Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis Yang Efektif	01- Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional		(indikator baru)	0,75	1.426,20	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	01 - Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan	01- IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut		68,00	76,50	2.699.877,83	119 - Badan Keamanan Laut
		02- IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut		54,00	61,30		119 - Badan Keamanan Laut



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Wilayah Yurisdiksi Indonesia	03- IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut		67,00	68,00		119 - Badan Keamanan Laut
		04- IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut		33,00	33,40		119 - Badan Keamanan Laut
		05- Indeks Survei dan Pemetaan Hidro- Oseanografi	persen	54,22	65,67		012 - Kementerian Pertahanan
02.06.01 KP: Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01 - Terwujudnya Penguatan Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01- Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut	persen	25,00	87,50	400,00	119 - Badan Keamanan Laut
	01 - Terwujudnya Penguatan Kapabilitas	01- IKLN Dimensi Kapasitas Patroli		72,00	72,20	1.602.000,71	119 - Badan Keamanan Laut



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.06.02 KP: Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Lembaga Keamanan Laut	02- Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI	persen	5,19	9,00		119 - Badan Keamanan Laut
		03- Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP		80,00	81,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.03 KP: Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	01 - Terwujudnya Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Peningkatan Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut, ALKI, dan Choke Point	01- IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan		58,00	68,20	1.086.710,71	119 - Badan Keamanan Laut
		02- Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional	persen	100,00	100,00		119 - Badan Keamanan Laut
		03- Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		91,00	93,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut	01 - Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut	01- Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan	persen	4,20	7,00	0,00	119 - Badan Keamanan Laut



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.06.05 KP: Pemetaan Batimetri dan Alur Laut serta Modernisasi Peralatan dan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Hidro-Oseanografi	01 - Terwujudnya Pemetaan Batimetri dan Alur Laut serta Modernisasi Peralatan dan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Hidro- Oseanografi	01- Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi	persen	54,22	65,67	10.766,42	012 - Kementerian Pertahanan
		02- Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi	persen	42,10	56,60		012 - Kementerian Pertahanan
02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali dan kondusif	01- Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		3,39 (2023)	3,70	35.645,34	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.07.01 KP: Melakukan Peningkatan Kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan Pengamanan Objek Vital	01 - Terwujudnya aparat keamanan yang memiliki kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan pengamanan objek vital sesuai dengan standar dan humanis	01- Indeks Harkamtibmas		3,28 (2023)	3,70	12.636,80	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.07.02 KP: Melakukan Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana	01 - Terwujudnya penyelesaian tindak pidana oleh Polri secara efektif, efisien dan tepat sasaran	01- Crime Rate	kasus kejahatan per 100.000 penduduk	214 (2023)	195	23.008,54	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02- Clearance Rate Tindak Pidana	persen	74,00 (2023)	76,00		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	01 - Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	01- Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian		85,77 (2023)	86,50	13.683.056,36	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.01 KP: Melakukan Peningkatan Kesiapan Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	01 - Terpenuhinya kebutuhan almatsus dan sarana prasarana Polri dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga kepolisian	01- Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)	persen	(indikator baru)	81,00	13.610.364,32	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.08.02 KP: Melakukan Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Layanan Kepolisian	01 - Terwujudnya peningkatan layanan kepolisian yang berkualitas dan mudah diakses yang didukung oleh teknologi terbaru	01- Indeks SPBE		3,00 (2023)	3,40	68.669,02	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri	persen	70 (2023)	72,00		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.03 KP: Melakukan Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan	01 - Terwujudnya kesetaraan gender di lingkungan Polri melalui penyesuaian rasio jumlah SDM dan pembaharuan work arrangement	01- Jumlah Pusat Pendidikan Polwan	unit	1	1	2.582,78	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02- Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan	orang	805	805		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Anggota Polri	01 - Terwujudnya SDM Polri yang memiliki standar kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri	01- Indeks Profesionalitas SDM Polri		(indikator baru)	71,00	1.440,24	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	01 - Terpeliharanya hubungan Internasional yang konduusif dengan	01- Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara		(indikator baru)	0,555	296.583,59	011 - Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	terselenggaranya diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi	02- Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional		4,97 (2023)	4,20 (skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		03- Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional		4,07	4,12 (skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		04- Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi		75,00	77,00		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.01 KP: Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema Good Neighbour Policy	01 - Terlaksananya percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy	01- Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga		52,43	71,96	7.290,14	011 - Kementerian Luar Negeri
		02- Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara		61,13	65,53		010 - Kementerian Dalam Negeri
02.09.02 KP: Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan	01 - Meningkatnya peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan	01- Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	persen	75,00	76,00	4.381,12	011 - Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>	
Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia	Indonesia dalam forum dan organisasi internasional, terbangunnya postur diplomasi, serta meningkatnya pelibatan diaspora Indonesia	02- Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	persen	75,00	76,00		011 - Kementerian Luar Negeri	
		03- Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	persen	75,00	76,00		011 - Kementerian Luar Negeri	
		04- Angka Pembangunan Postur Diplomasi		(indikator baru)		10		011 - Kementerian Luar Negeri
		05- Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	persen	15,00	25,00		011 - Kementerian Luar Negeri	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.09.03 KP: Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Menguatnya kerja sama pembangunan internasional	01- Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional	persen	(indikator baru)	40,00	5.655,85	011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.04 KP: Penguatan Diplomasi Ekonomi	01 - Terwujudnya penguatan diplomasi ekonomi	01- Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	persen	75,00	81,00	93.589,34	011 - Kementerian Luar Negeri
		02- Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas	persen	75,00	80,50		011 - Kementerian Luar Negeri
		03- Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	PTA/FTA/CEPA	19	24		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.09.05 KP: Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil	01 - Terwujudnya Perluasan Kesepakatan Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Orang untuk Perluasan Kesempatan Kerja dengan Keahlian Menengah dan Tinggi	01- Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil	kesepakatan	0	8	33.940,22	104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
02.09.06 KP: Proses Aksesi Indonesia ke OECD	01 - Terwujudnya aksesi Indonesia ke OECD	01- Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)	persen	-	-	151.726,92	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02- Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reuiu dari Komite OECD (2026- 2028)	persen	-	30,00		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2027-2029)	persen	-	-		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.10 PP: Swasembada Pangan	01 - Meningkatnya Ketersediaan Pangan Secara Berkelanjutan Berbasis Lumbung Pangan	01- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		95,06	97,51	95.707.145,09	125 - Badan Pangan Nasional
	02 - Meningkatnya Kualitas Konsumsi, Keamanan, dan Penanganan Kerawanan Pangan	01- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		93,50	94,50		125 - Badan Pangan Nasional
		02- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	persen	8,24	6,55		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	03 - Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Tata Kelola Sistem Pangan	01- Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	3,22	3,80		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)		0,693 (2023, angka kajian sementara BPS)	0,7731		018 - Kementerian Pertanian
02.10.01 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Kalimantan Tengah	01- Peningkatan Produksi Beras KSPP Kalimantan Tengah	ton	21.008	740.163	648.890,00	018 - Kementerian Pertanian
		02- Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah	ha	9.435	520.896		018 - Kementerian Pertanian
02.10.02 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Utara	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen hortikultura di KSPP Sumatera Utara	01- Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara	ton	27.362	33.440	0,00	018 - Kementerian Pertanian
		02- Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara	ha	24,15	2.200		018 - Kementerian Pertanian
02.10.03 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Sumatera Selatan	01- Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan	ton	44.010	859.313		018 - Kementerian Pertanian
		02- Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan	ha	16.949	671.236		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.10.04 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Nusa Tenggara Timur	01- Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	6.303 (2023)	84.723		018 - Kementerian Pertanian
		02- Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	0	53.975		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Nusa Tenggara Timur	01- Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	42.201	375.137		018 - Kementerian Pertanian
		02- Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	7.304	123.012		018 - Kementerian Pertanian
02.10.05 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Papua	01- Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua	ton	655	7.994		018 - Kementerian Pertanian
		02- Peningkatan luas panen Jagung KSPP Papua	ha	866	1.579		018 - Kementerian Pertanian
02.10.06 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan	01 - Meningkatnya produksi dan luas	01- Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan	ton	19.506	929.750		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
(KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	panen padi di KSPP Papua Selatan	02- Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan	ha	2.361	475.000		018 - Kementerian Pertanian
02.10.07 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	01 - Peningkatan produksi bahan pangan utama	01- Lahan Baku Sawah yang dicetak	ribu ha	0	75		018 - Kementerian Pertanian
		02- Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman	ribu ha	0	200		018 - Kementerian Pertanian
02.10.08 KP: Penguatan Cadangan Pangan	01 - Terjaganya Cadangan Pangan Nasional	01- Cadangan Beras Pemerintah (juta ton)	juta ton	1,79	3-3,5	25.780,85	125 - Badan Pangan Nasional
02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	01 - Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	01- Volume Produksi Ikan Budi Daya	juta ton	6,37	7,15	4.431.963,64	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02- Volume Produksi Perikanan Tangkap	juta ton	7,39	6,47		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	01 - Meningkatnya produksi bahan pangan hewani	01- Produksi Daging	juta ton	4,70	5,10	667.311,37	018 - Kementerian Pertanian
		02- Produksi Telur	juta ton	6,67	7,75		018 - Kementerian Pertanian
		03- Produksi Susu	ribu ton	808,35	1.036,70		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	01- Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	persen	-	83		127 - Badan Karantina Indonesia
02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	01 - Meningkatnya Produksi Pangan Lokal dan Nabati	01- Produksi Padi	juta ton	53,14	54,85	9.186.191,10	018 - Kementerian Pertanian
		02- Produksi Jagung	juta ton	20,47	22,51		018 - Kementerian Pertanian
		03- Produksi Aneka Kacang	ribu ton	446,189	552,84		018 - Kementerian Pertanian
		04- Produksi Buah dan Sayur	juta ton	28,52	31,85		018 - Kementerian Pertanian
		05- Produksi Sorghum	ribu ton	17,34	18,395		018 - Kementerian Pertanian
		06- Produksi Ubi Jalar	ton	1.385.689	1.562.972		018 - Kementerian Pertanian
		07- Produksi Kedelai	ton	217.721	381.470		018 - Kementerian Pertanian
		08- Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)	ton	267.219	500.000		143 - Kementerian Kehutanan
	01 - Meningkatnya Keanekaragaman	01- Konsumsi Buah dan Sayur	gram/kapita/hari	244,64	247,78	65.726,88	125 - Badan Pangan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.10.12 KP: Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia	02- Konsumsi Pangan Hewani	gram/kapita/ hari	124,48	131,70		125 - Badan Pangan Nasional
		03- Konsumsi Umbi- Umbian	gram/kapita/ hari	41,1	56,07		125 - Badan Pangan Nasional
		04- Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kap/tahun	25,07 (2023)	26,85		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.13 KP: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan	01- Indeks Keamanan Pangan Segar		60,00	62,00	617.323,08	125 - Badan Pangan Nasional
		02- Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan	persen	92,24	72,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03- Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	persen	-	35,00		127 - Badan Karantina Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	persen	-	100,00		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Terkendalinya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	01- Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	persen	-	87,00		127 - Badan Karantina Indonesia
		02- Persentase Wilayah Terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	persen	-	87,00		127 - Badan Karantina Indonesia
		03- Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	persen	-	87,00		127 - Badan Karantina Indonesia
		04- Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	persen	80,00	80,30		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.10.14 KP: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya Konsumsi Bahan Pangan Terfortifikasi/Biofortifik asi	01- Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	4	719.801,33	018 - Kementerian Pertanian
		02- Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	persen	0	40,00		125 - Badan Pangan Nasional
02.10.15 KP: Penanganan Kerawanan Pangan	01 - Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	01- Persentase daerah rentan rawan pangan	persen	12,00	15,60	43.820.878,40	125 - Badan Pangan Nasional
		02- Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	persen	4,02	3,60		125 - Badan Pangan Nasional
02.10.16 KP: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif	01 - Ditumbuhkan dan dikembangkannya Kelembagaan Ekonomi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	01- Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang terfasilitasi	lembaga	123	130	29.790.223,07	018 - Kementerian Pertanian
		02- Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi	lembaga	15	21		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya persentase petani muda	01- Persentase Petani Muda terhadap jumlah petani	persen	21,93 (ST 2023 BPS)	22,13		018 - Kementerian Pertanian
02.10.17 KP: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	01 - Meningkatnya Nilai Tambah Bahan Baku Industri Prioritas	01- Produksi Tanaman Obat	ton	495.767	532.171,06	5.660.940,38	018 - Kementerian Pertanian
		02- Produksi Vanili	ton	1.579 (2023)	1.585		018 - Kementerian Pertanian
		03- Produksi Lada	ton	64.279 (2023)	64.408		018 - Kementerian Pertanian
		04- Produksi Pala	ton	41.444 (2023)	41.568		018 - Kementerian Pertanian
		05- Produksi Florikultura	ribu tangkai	667.755,03	597.459,16		018 - Kementerian Pertanian
		06- Produksi Cengkeh	ton	133.408 (2023)	133.703		018 - Kementerian Pertanian
		07- Produksi Kopi	ton	758.725 (2023)	786.119		018 - Kementerian Pertanian
		08- Produksi Tebu	ton	33.216.612	39.555.979		018 - Kementerian Pertanian
		09- Produksi Karet	ton	2.240.826 (2023)	2.470.676		018 - Kementerian Pertanian
		10- Produksi Kakao	ton	632.117 (2023)	633.290		018 - Kementerian Pertanian
		11- Produksi Teh	ton	116.506 (2023)	116.579		018 - Kementerian Pertanian
		12- Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan	persen	0,67	2,04		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		13- Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura	persen	0,85	1,77		018 - Kementerian Pertanian
02.10.18 KP: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	01 - Meningkatnya Implementasi Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	01- Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan		0	3,10	72.115,00	018 - Kementerian Pertanian
		02- Proporsi Lahan Pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	persen	10,46 (2021)	11,50		018 - Kementerian Pertanian
		03- Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	persen	73,40	78,00		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya Nilai Tambah dan Ketertelusuran Produk Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	01- Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	persen	1,45 (2022)	1,49		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	03 - Terjaganya Sumber Daya Genetik Komoditas Produksi Pertanian	01- Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	varietas dan/atau galur	28 (2021)	30		018 - Kementerian Pertanian
		02- Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	aksesi	4.675,0 (2021)	4.725		018 - Kementerian Pertanian
02.11 PP: Swasembada Energi	01 - Meningkatnya ketersediaan energi	01- Pasokan Energi Primer	MTOE	273	323,2	3.643.917,20	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan energi	01- Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per Kapita	0,640	0,770		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya pemanfaatan energi bersih	01- Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	14,68	16,00 –20,00		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02- Intensitas Energi Primer	SBM/miliar rupiah	149,10	145,40		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.01 KP: Peningkatan Penyediaan Energi	01 - Meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01- Jumlah Lifting Minyak Bumi	Ribu Barrel Oil Per Day/BOPD	605,5	605–620	13.901,71	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	03 - Meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	01- Jumlah Produksi Batu Bara	Juta Ton	836,13	733		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02- Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	persen	100	100		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01- Jumlah Lifting Gas Bumi	Ribu Barrel Oil Equivalent Per Day/BOEPD	964	953-1.017		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.02 KP: Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	01 - Meningkatnya akses terhadap gas bumi	01- Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN	sambungan rumah (SR)	940.653	300.000	3.367.802,32	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02- Jumlah Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang Difasilitasi	km	22.533	22.600		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya akses terhadap BBM	01- Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi	juta kl	17	19,07		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi	juta kl	(indikator baru)	35,97		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya akses terhadap listrik	01- Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	ribu pelanggan	92.494	98.735		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	04 - Meningkatnya keterjangkauan energi	01- Deviasi Harga Jual Eceran BBM	persen	0	0		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02- Disparitas Harga Jual Eceran BBM Solar (jenis BBM tertentu) (Persen)	persen	49	50		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03- Disparitas Harga Jual Eceran Bensin (jenis BBM khusus penugasan) (Persen)	persen	22	25		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.03 KP: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	01 - Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	01- Konsumsi Biofuel	juta kl	13,15	14,36	262.213,17	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02- Produksi Listrik Energi Terbarukan	GWH	71.349,5	54.388		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya Efisiensi Energi	01- Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/miliar Rupiah	1,04	1,44		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.12 PP: Swasembada Air	01 - Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif	01- Kapasitas Tampungan Air	m3/kapita	58,99 (2025)	59,39	26.032.600,35	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	persen	52,83 (2025)	52,34		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	persen	61,55	61,73		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04- Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk	persen	15,6	15,83		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05- Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi	USD/m3	0,31	0,31		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06- Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	persen	8 (2025)	13		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	01- Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	persen	20,49 (2023)	36		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	10,25	17		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Rumah Tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	persen	3,2	1,5		024 - Kementerian Kesehatan
02.12.01 KP: Pembangunan dan Pengelolaan Tampung Air	01 - Meningkatkan dan terjaganya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan	01- Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	unit (kumulatif)	950 (2025)	950	4.861.879,60	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Jumlah bendungan yang selesai dibangun	unit (kumulatif)	0 (2025)	4		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	unit (kumulatif)	0 (2025)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04- Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	unit (kumulatif)	23 (2025)	23		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Jumlah bendungan yang direhabilitasi	unit (kumulatif)	4 (2025)	4		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.02 KP: Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air	01- Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	persen	35	35	3.642.680,07	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	wilayah sungai	50	50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	m3/detik (kumulatif)	77,45	77,70		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04- Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun	m3/detik (kumulatif)	0,05 (2025)	0,05		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05- Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	m3/detik (kumulatif)	0 (2025)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06- Luas layanan irigasi yang dikelola	ha (kumulatif)	3.142.532	3.155.532		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		07- Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dibangun untuk Pertanian Multikomoditas	ha (kumulatif)	13.000 (2025)	15.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		08- Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan	ha (kumulatif)	1.078.057 (2020-2024)	218.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		09- Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	miliar m3	58,32	52,63		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.03 KP: Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air	01 - Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	01- Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	persen	36	39	1.738.895,37	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	ha (kumulatif)	1.700 (2025)	2.700		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	unit (kumulatif)	549	549		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara	km (kumulatif)	1.784	1.809		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05- Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	juta m3	0,35	0,50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06- Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	kawasan (kumulatif)	0	5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		07- Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	wilayah sungai (kumulatif)	19	21		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.04 KP: Konservasi Sumber Daya Air	01 - Terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)	01- Luasan Lahan Kritis dalam DAS yang Dipulihkan	juta hektare	12,74 (2022)	12,40	405.786,22	143 - Kementerian Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat	01- Jumlah Mata Air yang Dipertahankan dan Diselamatkan	unit	50	120		143 - Kementerian Kehutanan
02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	01- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	24,00 (2020)	42,24	4.211.238,58	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Kapasitas SPAM Terbangun	liter/detik	281.045	282.716		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	30,12	33,00		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04- Persentase <i>Non-Revenue Water</i> PDAM	persen	33,51	30,00		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala	01- Kabupaten/Kota dengan Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat	kab/kota	65 (2023)	150	024 - Kementerian Kesehatan	
		02- Kabupaten/Kota Kualitas Air Minum pada Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	persen	65 (2023)	100	024 - Kementerian Kesehatan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>	
02.12.06 KP: Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	01 - Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur SPALD	01- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Berfungsi dengan Baik	kab/kota	196	270	4.330.615,59	145 - Kementerian Pekerjaan Umum	
		02- Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun	Sambungan Rumah	700.000	850.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum	
		03- Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik dan Disedot Secara Berkala	persen	9,35 (2023)	15,00		145 - Kementerian Pekerjaan Umum	
	02 - Meningkatkan keberfungsiaan dan kualitas infrastruktur SPALD	01- Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL		persen	0	30	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	
			02- <i>Idle Capacity</i> IPLT	persen	75,27 (2023)	65,00		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
			03- <i>Idle Capacity</i> IPAL	persen	65 (2023)	62		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	kab/kota	19 (2023)	40		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.07 KP: Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan	01 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)	01- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra SPAM	provinsi dan kab/kota	15 provinsi dan 103 kabupaten/kota	23 provinsi dan 261 kabupaten/kota	173.500,00	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	21 provinsi dan 505 kabupaten/kota	27 provinsi dan 508 kabupaten/kota		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	278 (2023)	350		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04- Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM	BUMN air minum	102	231		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya Kualitas	01- BUMD Air Minum Berkinerja Sehat	persen	65,48	81,00		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Aman dan Berkelanjutan		02- Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD)	kabupaten/ kota	127 (2023)	250		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03- Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik	BUMD air minum	5 (2023)	10		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04- BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)	persen	46,45	70,00		010 - Kementerian Dalam Negeri
		05- Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah Domestik	kabupaten/ kota	17 (2023)	50		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Tersedianya Landasan Regulasi dan Pedoman Penyelenggaraan Air	01- Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Perda terkait Tata Kelola Air Limbah Domestik	kabupaten/ kota	135 (2023)	250	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Minum dan Air Limbah Domestik	02- Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	6		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.08 KP: Penguatan Peran Masyarakat dan Ekosistem Air Minum dan Sanitasi Berbasis Inovasi dan Kolaborasi	01 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan Air Minum dan ALD	01- Kab/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM	kabupaten/ kota	4 (2023)	60	38.303,56	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Berkembangnya Ekosistem Air Minum dan Sanitasi Berbasis Inovasi	01- Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/Kota	provinsi	38	38		010 - Kementerian Dalam Negeri
		02- Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/Kota	provinsi	1 (2023)	25		010 - Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang Air Minum (kumulatif)	proyek (kumulatif)	0 (2023)	1		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04- Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan Air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	1		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05- Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	8	11		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06- Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.12.09 KP: Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	01 - Meningkatkan Ketahanan Terhadap Daya Rusak Air di Pesisir Utara Jawa	01- Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	hektare (kumulatif)	200 (2025)	400	6.629.701,37	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m3/detik (kumulatif)	0,2 (2025)	0,5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya layanan air minum dan sanitasi di Pesisir Utara Jawa	01- Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	persen	30	33,5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	kabupaten/ kota (kumulatif)	32	37		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.13 PP: Ekonomi Syariah	01 - Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	01- Kontribusi PDB Syariah	persen	46,72 (2023)	50,78	480.496,55	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.13.01 KP: Industri Halal dan UMKM Halal	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM halal	01- Persentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal	persen	n/a	5,19	8.200,00	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim	persen	20,41 (2023)	11,34		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.02 KP: Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional	01 - Meningkatnya ekspor produk halal berdaya saing global dan menguatnya kerjasama ekonomi syariah internasional	01- Nilai Ekspor Halal/PDB	persen	3,69 (2023)	3,74	1.616,40	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.03 KP: Ekosistem Halal	01 - Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah	01- Jumlah Produk Baru yang Tersertifikasi Halal	juta produk	2,22	7,00	466.339,75	142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
02.13.04 KP: Keuangan Syariah	01 - Meningkatnya peran keuangan syariah mendukung perekonomian nasional	01- Aset Keuangan Syariah/PDB	persen	42,67	46,62	4.340,40	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.13.05 KP: Dana Sosial Syariah	01 - Meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perekonomian dan perlindungan sosial nasional	01- Zakat Infat Sedekah-Dana Sosial Keagamaan (ZIS-DSKL)/PDB	persen	0,155 (2023)	0,178	0,00	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02- Aset Wakaf Uang/PDB	persen	0,011 (2023)	0,018		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.14 PP: Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Digital Dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Digital Terhadap PDB	01- Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	persen	8	9-10	238.388,28	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.14.001 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya Jumlah SDM Digital	01- Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)	persen	3	3,71		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02- Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)	persen	79 (2023)	85		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan	01 - Meningkatnya Pengembangan	01- Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis		39,12 (2022)	40,70		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Ekonomi dan Industri Digital	02- Tingkat kesuksesan startup digital nasional ( <i>success rate startup digital</i> )	persen	0	8		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03- Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia <i>Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) &gt; 3.0</i>	perusahaan	74 (2023)	103		019 - Kementerian Perindustrian
		04- Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	persen	4,3	4,3		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	01 - Meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material	01- Tingkat input material sirkular	persen	9 (indikator baru)	9,4	171.866,64	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki	01- Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	perusahaan (akumulatif)	96	164	58.150,00	019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	02- Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	persen	10	12		019 - Kementerian Perindustrian
02.15.02 KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	01 - Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan	01- Persentase Penurunan Susut Pangan	persen	3	3-5	76.033,28	018 - Kementerian Pertanian
	02 - Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	01- Persentase Pangan yang Terselamatkan	persen	1,44	3-5		125 - Badan Pangan Nasional
02.15.03 KP: Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	01 - Meningkatkan jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	01- Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan	produk ramah lingkungan (akumulatif)	51	90	21.565,51	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.15.04 KP: Penguatan Ekosistem Daur Ulang	01 - Peningkatan kapasitas dan tingkat daur ulang	01- Persentase sampah yg didaur ulang	persen	13	17	16.117,86	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	03 - Meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya genetik keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01- Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik	model	1	1	392.835,18	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	01 - Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan serta konservasi ekosistem dan spesies	01- Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati	unit	0,40 (2020)	0,55		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01- Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan		0,31 (2020)	0,39		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.16.01 KP: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	01 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	01- Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	unit	294 (2023)	325	112.067,68	143 - Kementerian Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01- Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil		49,56 (2023)	52,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	03 - Meningkatnya luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01- Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	persen	8,98 (2023)	9,44		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	04 - Meningkatnya pengelolaan Areal Preservasi	01- Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	hektare	(indikator baru)	500.000		143 - Kementerian Kehutanan
		02- Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanaan dan pengelolaanya	unit	2	2		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	05 - Meningkatnya pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem melalui pengembangan geopark	01- Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark	unit (kumulatif)	10	13		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	06 - Meningkatnya pemulihan ekosistem terdegradasi	01- Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	hektare	29.734,22	22.000		143 - Kementerian Kehutanan
02.16.02 KP: Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan	01 - Berkurangnya status keterancaman spesies	01- Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies		0,75	0,75	71.920,00	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Menurunnya penyebaran jenis asing invasif di Indonesia	01- Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia	persen	(indikator baru)	82		127 - Badan Karantina Indonesia
02.16.03 KP: Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati	01 - Meningkatnya tata kelola keanekaragaman hayati	01- Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	kelompok masyarakat (kumulatif)	(indikator baru)	775	29.550,15	143 - Kementerian Kehutanan
		02- Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	dokumen	1	1		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati	lembaga	(indikator baru)	10		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		04- Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati	inovasi	50 (2023)	120		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
02.16.04 KP: Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan	01- Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	miliar Rupiah	25,96	26	14.047,35	143 - Kementerian Kehutanan
		02- Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES		62,40 (2023)	68,95		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03- Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	persen	(indikator baru)	65		127 - Badan Karantina Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
	02 - Meningkatnya pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	01- Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	juta hektare (kumulatif)	2,0	2,2		143 - Kementerian Kehutanan
		02- Nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	miliar Rupiah	204	215		143 - Kementerian Kehutanan
02.16.05 KP: Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan	01- Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	produk (kumulatif)	10	15	165.250,00	143 - Kementerian Kehutanan
		02- Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi	produk	25	75		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)	01- Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)	rekomendasi kebijakan (kumulatif)	40	48		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air	01- Indeks Kualitas Air (IKA)		54,78	72,21	528.285,26	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	01- Indeks Kualitas Udara (IKU)		90,13	78,77		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	01- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		81,67	81,07		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	01- Indeks Kualitas Lahan (IKL)		61,95	78,02		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	05 - Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	01- Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	persen	30	40		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	06 - Terpeliharanya kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	01- Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	persen	0,564	≤50		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.01 KP: Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	01 - Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau	01- Ketersediaan Status Mutu DAS dan Danau	data	188	192	15.023,25	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya kualitas air permukaan	01- Jumlah Sungai dan Danau yang Mengalami Peningkatan Status Mutu	lokasi	1	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri	01- Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu	industri	2.853	3.030		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.02 KP: Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota	01 - Meningkatnya pengelolaan kualitas udara	01- Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara	kabupaten/ kota	0	514	21.800,00	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya pengelolaan emisi udara di industri, prasarana, dan jasa	01- Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara	industri	2.855	3.030		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.03 KP: Peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	01 - Meningkatnya pemulihan kualitas ekosistem pesisir dan laut yang terkontaminasi	01- Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan	m2	127.600	5.000	4.700,00	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02- Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah	pelabuhan/ industri	36	40		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03- Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut	provinsi	0	37		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.04 KP: Peningkatan kualitas lahan	01 - Meningkatnya luasan lahan rusak yang dipulihkan	01- Indeks Kualitas Tutupan Lahan		77,98	78,03	276.177,45	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya pengelolaan kerusakan lahan	01- Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan	kabupaten/ kota	0	552		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan	01- Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)	industri	113	118		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	01- Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS	persen	5,85	19,95		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		02- Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	persen	70,38	75,52		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
02.17.05 KP: Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	01 - Meningkatnya ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut	01- Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)		64,11	64,19	4.750,00	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut	industri	330	265		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.06 KP: Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Limbah Radioaktif	01 - Meningkatnya jumlah B3 yang dikelola	01- Jumlah B3 yang dikelola	ton	6.220.572	6.503.006	6.050,03	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola	01- Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola	ton	62.508.066	70.206.500		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya jumlah limbah radioaktif yang dikelola	01- Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola	fasilitas	0	2		085 - Badan Pengawas Tenaga Nuklir
02.17.07 KP: Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang	01 - Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi	01- Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya	usaha/ kegiatan/izin	80	250	180.984,52	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Menurunnya tingkat kerawanan kawasan hutan	01- Luas kawasan hutan yang diamankan	hektare	4.589.460 (2023); 1.200.000 (target 2024)	900.000		143 - Kementerian Kehutanan
	03 - Meningkatnya penyelesaian tindak pidana dan perdata, dan sengketa terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01- Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	perkara	14	22		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Meningkatnya Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal	01- Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	persen	50	54		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
02.17.08 KP: Penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup	01 - Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	01- Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	provinsi/ kabupaten/ kota	24	75	18.800,00	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya kualitas kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan	01- Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	persen	100	100		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan hidup	01- Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	persen	63	70		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya IKPS Nasional	01- Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)		52,64 (2023)	60	1.502.019,13	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	01 - Meningkatnya Sampah yang dikelola	01- Persentase Sampah yang dikelola	persen	39,01	63,41	19.613,19	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	01- Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	kabupaten/ kota	4 (2023)	60		024 - Kementerian Kesehatan
02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	01 - Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	01- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	28 (17 terdaur ulang)	1.482.405,94	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	ton	744,6	296		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Menurunnya emisi GRK (%)	01- Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	persen	17,47 (2023)	19,07	1.516.725,51	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	persen	28,53 (2023)	27,35		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
02.19.01 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	01 - Menurunnya Emisi GRK Sektor Energi	01- Reduksi Emisi GRK Sektor Energi	juta ton CO2-Eq	142	187	1.357.515,50	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.19.02 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Berbasis Lahan	01 - Menurunnya emisi GRK dari Sektor Lahan	01- Reduksi Emisi GRK Sektor Hutan	juta ton CO2-Eq	-	428,92	64.195,40	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02- Reduksi Emisi GRK Sektor Pertanian	juta ton CO2-Eq	-	6,89		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.19.03 KP: Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	01 - Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	01- Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi		0	60	17.850,00	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.19.04 KP: Peningkatan upaya dekarbonisasi industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor Industri	01- Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	juta ton CO2-Eq	6,75 (2022)	6,79	1.050,00	019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.19.05 KP: Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah	02 - Menurunnya Emisi GRK sektor Pengelolaan Limbah	01- Reduksi Emisi GRK Sektor Limbah	juta ton CO2- Eq	8,8	18,04	4.207,65	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.19.06 KP: Penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon	01 - Meningkatkan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK	01- Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi	sektor	5	5	71.906,97	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02- Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon	kebijakan	2	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.20 PP: Pekerjaan Hijau/Green Jobs	01 - Meningkatnya Proporsi Tenaga Kerja Hijau	01- Proporsi Tenaga Kerja Hijau	persen	2,62 (2023)	2,76-2,83	517.308,81	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.01 KP: Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/Green Jobs	01 - Berkembangnya Ekosistem Pekerjaan Hijau/Green Jobs	01- Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs	kebijakan	0	1	22.031,93	026 - Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Menguatnya Peran Asosisasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs	01- Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs	kerja sama	0	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.02 KP: Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau	01 - Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau	01- Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijainya	orang	120.000 (2023)	500.000	495.276,88	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02- Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan	dokumen	(indikator baru)	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatkan aktivitas ekonomi hijau di sektor kehutanan	01- Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan	triliun Rupiah	122,2	136,19	242.480,53	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.01 KP: Peningkatan Produktivitas Hutan	01 - Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kehutanan secara berkelanjutan	01- Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	triliun Rupiah	7,16	8,29	25.700,53	143 - Kementerian Kehutanan
		02- Nilai ekspor produk kehutanan	miliar USD	15,01	15,82		143 - Kementerian Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.21.02 KP: Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri	01 - Meningkatkan potensi pengembangan produk bioekonomi hutan	01- Nilai Investasi Sektor Kehutanan	triliun Rupiah	0	0,48	30.796,44	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.03 KP: Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari	01- Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)	unit	1.467	1.587	12.528,84	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.04 KP: Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Menguatnya kepastian legalitas dan legitimasi kawasan hutan	01- Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	desa	0	1.056	57.115,12	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.05 KP: Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan	01 - Menguatnya Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01- Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok)	kelompok masyarakat	14.774	16.454	39.198,50	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan	01- Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	miliar Rupiah	1.400	2.150		143 - Kementerian Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.21.06 KP: Perlindungan dan Pengamanan Hutan	01 - Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	01- Penurunan Laju Deforestasi	juta ha/tahun	0,120	0,106	77.141,11	143 - Kementerian Kehutanan
02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	01 - Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	01- IBEI Pilar Ekonomi		22,19 (2023)	26,90	2.619.187,38	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	02 - Meningkatnya Perlindungan Kawasan Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	01- IBEI Pilar Lingkungan		31,27 (2023)	36,68		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	03 - Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru	01- IBEI Pilar Sosial		55,19 (2023)	59,82		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
02.22.01 KP: Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	01 - Memperkuat tata Kelola ekonomi biru	01- Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	persen	91,17	34,69	1.091.676,20	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02- Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		81,00	83,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil		0,45	0,52		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		04- Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman	persen	≤80	≤80		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.02 KP: Peningkatan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Ekosistem Pesisir	01 - Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	01- Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (kumulatif)	juta ha	16,5	19,1	141.277,32	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02- Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	juta ha	29,2	30,7		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.03 KP: Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kelautan dan perikanan	01- Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)	persen	5,49 (2023)	4,00-6,00	741.497,62	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02- Volume Produksi Ikan	juta ton	13,95 (2023)	13,62		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03- Volume Produksi Olahan Perikanan	juta ton	3,62 (2023)	3,83		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- PDB Perikanan	triliun Rupiah	554,04 (2023)	626,04		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		05- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)	juta Rupiah	220.600	610.846		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		06- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia	juta Rupiah	77.361	522.042		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		07- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang	juta Rupiah	659.210	457.541		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.22.04 KP: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	01- Volume Produksi Garam	juta ton	2	2,50	6.300,00	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02- Produktivitas Lahan Garam Rakyat	ton/ha	83	85		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03- Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri	persen	50	55.12		019 - Kementerian Perindustrian
		04- Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut	persen	41,93	50		019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam	juta Rupiah	2.280.864	8.624.751		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.22.05 KP: Penguatan Industri Transportasi Laut	01 - Meningkatnya Nilai Tambah Industri Galangan Kapal Pendukung Transportasi Penyabrangan	01- Volume Reparasi Kapal	ribu DWT (kumulatif)	9,5 (Jan-Nov 2024)	11,4	7.150,00	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Volume Produksi Pembuatan Kapal	ribu DWT (kumulatif)	0,98	1.2		019 - Kementerian Perindustrian
		03- Nilai Ekspor Industri Perkapalan	ribu USD	830,89	939,41		019 - Kementerian Perindustrian
02.22.06 KP: Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan bahari dan danauserta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan	01- Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau	lokasi destinasi pariwisata bahari	0	10	128.385,24	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu perjalanan	7.797,76 (2023)	14.435,13		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu kunjungan	8.344,92 (2023)	13.144,47		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
02.22.07 KP: Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru	01 - Meningkatnya hasil dan pemanfaatan riset, Sumber Daya Manusia di sektor Biru	01- Pusat Inovasi Berbasis Maritim	unit (kumulatif)	0	1	502.901,00	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02- Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja	persen	74,17 (2023)	76		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF, SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
03 PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01 - Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	01- Stok Infrastruktur terhadap PDB	persen	43,00 (2019)	47,00	25.072.799,67	132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	02 - Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	01- Total Aset Sektor Keuangan/PDB	persen	169,10	188,60		Otoritas Jasa Keuangan
	03 - Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	01- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	persen	24,50	37,95	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
	04 - Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	01- Rasio PDB Pariwisata	persen	3,72 (2022)	4,60-4,70	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Devisa Pariwisata	miliar USD	16,71	22,00–24,70		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	05 - Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	01- Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	persen	6,92	7,40–8,00		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	01 - Meningkatnya Konektivitas dan Layanan Multimoda melalui Integrasi transportasi Darat, Laut dan Udara	01- Waktu Tempuh Pada Lintas Utama Jaringan Jalan Nasional	jam/100 km	1,90	1,85	17.263.127,68	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Pencarian dan Pertolongan	persen	98,20 (2023)	98		107 - Badan SAR Nasional
		03- Jumlah Perjalanan Kereta Api	juta perjalanan	0,86	0,95		022 - Kementerian Perhubungan
		04- On Time Performance Penerbangan	persen	73,78	81,00		022 - Kementerian Perhubungan
		05- Peningkatan Volume Angkutan Laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen	-7,20 (2023)	12,10		022 - Kementerian Perhubungan
		06- Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	juta penumpang	501	538		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
		07- Volume Angkutan Penyeberangan	juta kendaraan	11,50 (2023)	11,80		022 - Kementerian Perhubungan
		08- Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	870		022 - Kementerian Perhubungan
		09- Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan	persen	53,68 (2023)	67		022 - Kementerian Perhubungan
		10- Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	persen	85,50 (2023)	86		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.01 KP: Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan	01 - Meningkatkan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan.	01- Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan	km/100 km2	2,70	2,78	4.622.317,55	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Panjang Jalan Tol yang Beroperasi (kumulatif angka dasar tahun 2020)	km	933 (2020 - 2024)	1.399		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	persen	95/69/55	95/72/58/83		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.02 KP: Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA	01 - Terwujudnya KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA	01- Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	3.183.938,27	022 - Kementerian Perhubungan
		02- Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	persen	63 (2023)	66		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Penguatan KA Angkutan Barang	Angkutan Barang yang Andal	03- Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	95		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.03 KP: Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu	01 - Terwujudnya Jaringan Pelabuhan yang Terpadu	01- Pelabuhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (kumulatif angka dasar 2020)	lokasi	72	138	4.318.626,70	022 - Kementerian Perhubungan
		02- Penumpang Angkutan Laut Nonkomersil	ribu penumpang	1,296	1.731		022 - Kementerian Perhubungan
		03- Muatan Barang Angkutan Laut Nonkomersil	ton	986.594	807.981		022 - Kementerian Perhubungan
		04- Tingkat Keandalan Kenavigasian	persen	92,33 (2023)	95,45		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.04 KP: Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk Mendukung Konektivitas wilayah	01- Bandara yang Dibangun dan Dikembangkan (kumulatif)	lokasi	116 (2020-2024)	116 (2020-2026)	818.624,17	022 - Kementerian Perhubungan
		02- Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo	layanan	309	313		022 - Kementerian Perhubungan
		03- Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan	persen	83,49	78		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.05 KP: Penguatan Konektivitas	01 - Terwujudnya Konektivitas Darat	01- Pelabuhan Penyeberangan yang Beroperasi	lokasi, kumulatif	230 (2023)	235	1.550.898,46	022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkualitas	02- Terminal Penumpang yang Beroperasi	lokasi, kumulatif	113 (2023)	115		022 - Kementerian Perhubungan
		03- Lokasi Rawan Kecelakaan yang Ditangani	lokasi, kumulatif	179 (2023)	162		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.06 KP: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terwujudnya Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan yang Efisien	01- Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (kumulatif)	kota	6 (2020-2023)	14 (2020-2026)	1.629.030,73	022 - Kementerian Perhubungan
		02- Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan	juta penumpang/hari	1,40 (2023)	1,43		022 - Kementerian Perhubungan
		03- Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	juta penumpang/hari	2,989 (2023)	2,828		022 - Kementerian Perhubungan
		04- Infrastruktur Jalan Perkotaan yang Dibangun (kumulatif)	km (kumulatif)	51,50 (2020 - 2024)	67,11 (2020 - 2026)		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.07 KP: Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi	01 - Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Transportasi yang Berdaya Saing	01- Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi	persen	92 (2023)	92,50	607.371,44	022 - Kementerian Perhubungan
		02- Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi	persen	85,10 (2023)	70,00		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.08 KP: Peningkatan Layanan	01 - Meningkatkan Layanan Pencarian dan Pertolongan	01- Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	persen	42,10 (2023)	47,90	532.320,37	107 - Badan SAR Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Transportasi	pada Kecelakaan Transportasi	02- Ketersediaan SDM Pencarian dan Pertolongan yang Terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020)	orang, kumulatif	5.155 (2020-2023)	15.608		107 - Badan SAR Nasional
03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	01 - Meningkatkan Pembangunan TIK di Tingkat Nasional	01- Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional	-	5,90 (2023)	6,15	5.632.577,73	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
	02 - Meningkatkan Transformasi Digital	01- Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	-	49,20 (2022)	51,23		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
	03 - Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkualitas	01- Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1.411	1.520		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.01 KP: Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	01 - Meningkatkan Cakupan dan Kualitas di Bidang	01- Jangkauan Jaringan Fiber Optik per Kecamatan	persen	70,53 (2023)	82,00	5.343.552,90	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02- Integrated Index for Postal Development (2IPD)	-	50 (2022)	65		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>	
Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran		03- Jangkauan Penyiaran Televisi Siaran Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) per Populasi	persen	73,44 (2023)	75,00		117 - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	
		04- Jangkauan Penyiaran Radio Terrestrial per Populasi	persen	70 (2023)	76,00		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	
		05- Jangkauan Jaringan Pitalabar Bergerak (Mobile Broadband) per Populasi	persen	97,16 (2023)	97,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital	
		06- Pelanggan Terlayani Jaringan Pitalabar Tetap (Fixed Broadband) terhadap Total Rumah Tangga	persen	20,82 (2023)	35,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital	
		07- Pengguna Internet	persen	79,50	82,70		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital	
		08- Pertumbuhan Pengakses Streaming Siaran Radio Digital	persen	31 (2023)	40,00		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	
		02 - Meningkatnya Kualitas Internet	01- Kecepatan Internet Jaringan Pitalabar Tetap (Fixed Broadband)	Mbps	32,10	45,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
	Pitalebar (broadband) Nasional	02- Kecepatan Internet Jaringan Pitalebar Bergerak (Mobile Broadband)	Mbps	38,91 (2023)	60,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03- Rasio Harga Layanan Jaringan Pitalebar Tetap terhadap Pendapatan per Kapita	persen	8,41 (2021)	4,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	01 - Meningkatnya Ekosistem Digital untuk Mendukung Pemerintah dan Masyarakat Digital	01- Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat		51,75 (2022)	52,12	107.642,09	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02- Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah		51,13 (2022)	54,85		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03- Kapasitas Pusat Data Perkapita	watt perkapita	0,74	2,81		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		04- Indeks Ruang Digital Kondusif		0,00	3,20		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
03.02.03 KP: Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Beban Dasar dan Variabel	01 - Terbangunnya Infrastruktur Pembangkit Listrik yang Andal	01- Kapasitas Pembangkit Listrik (kumulatif angka dasar tahun 2024)	GW	100,69	106,78	3.832,75	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02- Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik	juta ton CO2	16,94	17,23		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03- Produksi Tenaga Listrik	GWh	339.459	381.496		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
03.02.04 KP: Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	01 - Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Jaringan Tenaga Listrik	01- Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	kms	11.146	4.133	2.950,00	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02- Kapasitas Gardu Induk	MVA	12.276	7.270		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03- Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	kms	18.014	11.083		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		04- Kapasitas Gardu Distribusi	MVA	2.368	1.456		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		05- Rasio Elektrifikasi Nasional	persen	99,83	99,90		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		06-System Average Interruption Duration Index (SAIDI) / System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) Nasional	(jam/ pelanggan/tahun) / (kali/ pelanggan/ tahun)	5,34 / 3,23	5,26 / 3,99		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		07- Susut Jaringan	persen	8,69 (TW III)	8,61		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.05 KP: Perluasan Jangkauan Infrastruktur Tenaga Listrik	01 - Meningkatkan Jangkauan	01- SPKLU dan Private Charging Station Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	3.202	5.971	174.600,00	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Infrastruktur Tenaga Listrik	02- SPBKLU Terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	1.902	2.277		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03- Koneksi Tenaga Listrik Tambahannya yang Berkualitas	unit	155.429	100.000		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	01 - Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Formal	01- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	persen	0,97	1,12	1.353.426,56	149 - Kementerian Koperasi
		02- Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	persen	3,06	3,15		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		03- Rasio Kewirausahaan	persen	3,08	3,18		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	01 - Meningkatnya Kontribusi Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Kontribusi Koperasi	01- Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi	persen	7,24	8,60	323.350,09	149 - Kementerian Koperasi
03.03.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	01 - Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Akses UMKM pada Sumber Daya Produktif	01- Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha	persen	18,64	20,00	230.702,77	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		02- Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan	persen	19,00	22,20		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>	
03.03.03 KP: Pengembangan Kewirausahaan	01 - Meningkatkan jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap	01- Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh	persen	18,99	19,98	799.373,71	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	01- Aset Perbankan/PDB	persen	57,21	64,51	39.562,00	Otoritas Jasa Keuangan	
		02- Aset Dana Pensiun/PDB	persen	6,81	7,63		Otoritas Jasa keuangan	
		03- Aset Asuransi/PDB	persen	8,93	9,30		Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
		04- Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	persen	55,72	59,90		Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
		05- Total Kredit/PDB	persen	35,35	38,46		Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
		06- Inklusi Keuangan	persen	88,70 (2023)	91,50		Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
03.04.01 KP: Penguatan Peran Perbankan	01 - Meningkatkan Peran Perbankan	01- Total DPK/PDB	persen	39,92	42,73	-	Otoritas Jasa Keuangan	
		02- Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	persen	19,23	22,24		Otoritas Jasa Keuangan	
		01- Densitas Dana Pensiun	juta Rupiah	1,01	1,14		37.277,00	Otoritas Jasa Keuangan
		02- Penetrasi Asuransi	persen	2,7	3,1		Otoritas Jasa Keuangan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
03.04.02 KP: Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank	01 - Memperkuat Peran Sektor Keuangan Nonbank	03- Nilai transaksi saham/PDB	persen	16,99	18,81		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.03 KP: Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	01 - Meningkatnya Inklusi dan Literasi Keuangan	01- Indeks Literasi Keuangan	persen	54,23	60,27	2.285,00	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya nilai tambah dan Daya Saing kepariwisataan	01- Pengeluaran Wisatawan mancanegara	USD/kunjungan	1.239 (2023)	1.372-1.404	581.654,20	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Tenaga Kerja Pariwisata	juta orang	22,89 (2022)	26,53		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index, *terbit bienial tahun genap)		22	20		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Kunjungan Wisatawan mancanegara	juta kunjungan	11,57 (2023)	16,0-17,6		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Perjalanan Wisatawan Nusantara	juta perjalanan	852,80 (2023)	1.176		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi	01 - Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing	01- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	19.976.019,10 (2023)	23.124.739,11	65.642,35	147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	Kepariwisataan Borobudur- Yogyakarta- Prambanan	02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	22.165,11	25.282,06		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata	juta USD	672,00	767,94		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Jawa Tengah	orang	3.214.769 (2023)	3.408.096		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	955.099,60 (2023)	1.330.356,95		147 - Kementerian Pariwisata
		06- Tenaga Kerja Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (DIY)	orang	471.212 (2023)	484.686		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.02 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Bali	01 - Meningkatkan Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Bali	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali	juta Rupiah	54.683.173,97 (2023)	63.302.609,27	119.740,27	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Bali	miliar Rupiah	101.325,81 (2023)	136.347,00		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata Bali	juta USD	9.364,00 (2019)	13.319,94		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Bali	orang	622.432 (2022)	651.718		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata Bali	juta Rupiah	7.547.919,45 (2023)	10.513.486,87		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
03.05.03 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	01 - Meningkatkan Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Kepulauan Riau	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau	juta Rupiah	6.301.872,60 (2023)	7.295.205,27	35.235,00	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Kepulauan Riau	miliar Rupiah	5.413,10 (2019)	6.925,58		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata Kepulauan Riau	juta USD	2.001,10 (2019)	3.243,58		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Kepulauan Riau	orang	236.159 (2022)	317.193		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata Kepulauan Riau	juta Rupiah	2.355.111,35 (2023)	3.280.431,44		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.04 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta	01 - Meningkatkan Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Jakarta	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta	juta Rupiah	191.980.855,20 (2023)	222.241.837,50	33.351,88	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Greater Jakarta	miliar Ruiah	367.760,29 (2023)	452.039,65		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata Jakarta	juta USD	2.291,80 (2019)	3.680,13		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Greater Jakarta (DKI)	orang	1.479.227 (2022)	1.557.469		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Tenaga Kerja Pariwisata Greater Jakarta (Jawa Barat)	orang	4.978.804 (2022)	5.811.446		147 - Kementerian Pariwisata
		06- Tenaga Kerja Pariwisata Greater Jakarta (Banten)	orang	1.230.545 (2022)	1.635.835		147 - Kementerian Pariwisata
		07- Investasi Sektor Pariwisata Greater Jakarta	juta Rupiah	12.650.725,3 (2023)	15.784.170,80		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.05 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok- Gili Tramena	01 - Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataaan Lombok-Gili Tramena	01- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	2.206.361,02 (2023)	2.554.138,68	73.619,91	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	12,566	17.550,24		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata	juta USD	290 (2018)	957,52		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata	orang	430.437 (2023)	555.502		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	4.488.604,30 (2023)	6.252.170,90		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.06 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado- Likupang	01 - Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataaan Manado-Likupang	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang	juta Rupiah	2.573.717,65 (2023)	2.979.399,89	16.235,00	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Manado-Likupang	miliar Rupiah	6.491,89 (2019)	10.572,37		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Devisa Pariwisata Manado-Likupang	juta USD	139 (2019)	297,81		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Manado-Likupang	orang	208.674 (2022)	223.800		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata Manado-Likupang	juta Rupiah	774.326,55 (2023)	1.078.558,41		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.07 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung	01 - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bangka- Belitung	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung	juta Rupiah	3.281.893,64 (2023)	3.792.692,93	17.415,00	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Bangka Belitung	miliar Rupiah	2.455,23 (2019)	14.925,58		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata Bangka Belitung	juta USD	23,90 (2019)	48,60		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung	orang	98.106 (2022)	113.192		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata Bangka Belitung	juta Rupiah	527.458,60 (2023)	734.696,38		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.08 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi	01 - Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing	01- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	2.193.003,64 (2022)	2.538.675,84	126.772,30	147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Pariwisata Prioritas Danau Toba	Kepariwisataan Danau Toba	02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	1.925,20	2.179,51		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata	juta USD	145,70	184,40		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata	orang	1.248.769 (2023)	1.327.710		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	411.336,50 (2023)	572.950,06		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.09 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Raja Ampat	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat	juta Rupiah	14.636,37 (2022)	19.106,32	18.500,00	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Raja Ampat	miliar Rupiah	195,67 (2022)	332,80		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata dari Raja Ampat	juta USD	5 (2019)	47,96		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Raja Ampat	orang	7.542 (2022)	9.623		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata Raja Ampat	juta Rupiah	12.575,05 (2023)	17.515,77		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
03.05.10 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataaan Labuan Bajo	01- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	juta Rupiah	38.850 (2023)	45.063,74	29.322,50	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara	miliar Rupiah	974,49	1.417,33		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata	juta USD	231,57	347,12		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata	orang	299.160 (2023)	324.957		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata	juta Rupiah	532.233,85 (2023)	741.347,82		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.11 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo- Tengger-Semeru	01 - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bromo- Tengger-Semeru	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru	juta Rupiah	17.501.425,28 (2023)	20.225.375,70	19.085,00	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara di Bromo-Tengger- Semeru	miliar Rupiah	838,70	1.474,67		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata Bromo- Tengger-Semeru	juta USD	4,00 (2019)	9,46		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	orang	3.493.968 (2022)	4.121.599		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Investasi Sektor Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta Rupiah	778.773,45 (2023)	1.084.752,49		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.12 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Wakatobi	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi	juta Rupiah	35.525,73 (2023)	41.055,01	12.650,00	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Wakatobi	miliar Rupiah	108	163,66		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata Wakatobi	juta USD	7,44	11,84		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Wakatobi	orang	209.447 (2022)	256.301		147 - Kementerian Pariwisata
		05- Investasi Sektor Pariwisata Wakatobi	juta Rupiah	31.376,65 (2023)	53.701,14		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.13 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Morotai	01- PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai	juta Rupiah	2.584,92 (2023)	2.992,37	14.085,00	147 - Kementerian Pariwisata
		02- Pendapatan dari Wisatawan Nusantara Morotai	miliar Rupiah	103,92 (2022)	177,57		147 - Kementerian Pariwisata
		03- Devisa Pariwisata Morotai	juta USD	0,69	0,89		147 - Kementerian Pariwisata
		04- Tenaga Kerja Pariwisata Morotai	orang	73.603 (2022)	86.163		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Investasi Sektor Pariwisata Morotai	juta Rupiah	1.151,65 (2023)	55.422,25		147 - Kementerian Pariwisata
03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	01 - Meningkatkan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif	01- Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	persen	5,30 (2022)	5,70	202.451,50	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02- Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif	persen	-11,07 (2023)	5,30		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03- Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	juta orang	24,92 (2023)	26,06		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		04- Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif	persen	31,94 (2023)	5,80-7,50		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.01 KP: Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif	01 - Meningkatkan Investasi Ekonomi Kreatif	01- Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	triliun Rupiah	89,33 (2023)	131,00-146,46	65.624,87	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.02 KP: Penguatan Ekosistem	01 - Meningkatkan Kinerja Subsektor	01- Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	persen	2,72 (2022)	7,45-9,90	25.620,00	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Film, Animasi, Video, dan Musik	Film, Animasi, Video, dan Musik	02- Pertumbuhan Ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	persen	-8,00 (2020)	7,30–12,30		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03- Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	ribu orang	188 (2022)	208		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.03 KP: Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya	01 - Meningkatkan Kinerja Subsektor Fesyen dan Kriya	01- Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya	persen	7,76 (2022)	5,90–8,00	38.510,63	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02- Pertumbuhan Ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya	persen	-12,01 (2023)	4,00		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03- Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya	ribu orang	9.107 (2022)	10.092		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	01 - Meningkatkan Kinerja Subsektor Aplikasi dan Gim	01- Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim	persen	2,58 (2022)	6,90–7,40	55.488,03	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02- Pertumbuhan Ekspor Subsektor Aplikasi dan Gim	persen	152,41 (2021)	6,50–11,70		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim	ribu orang	152 (2022)	200		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.05 KP: Penguatan Ekosistem Kuliner	01 - Meningkatkan Kinerja Subsektor Kuliner	01- Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner	persen	8,61 (2022)	5,80-8,90	17.207,97	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02- Pertumbuhan Ekspor Subsektor Kuliner	persen	-2,47 (2023)	5,70		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03- Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner	ribu orang	13.435 (2022)	14.259		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

PRIORITAS NASIONAL 4: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04 PN: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	01 - Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	01- Rata-rata Nilai PISA: Membaca; Matematika; Sains		359; 366; 383 (2022)	396; 404; 416	518.706.102,11	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02- Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	tahun	9,22	9,45		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03- Harapan Lama Sekolah	tahun	13,21	13,36		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04- Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi	persen	68,14	68,50		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	10,20	11,49		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06- Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi		63,06; 55,92	65,89; 58,86		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua	01- Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,15	74,68		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	rata-rata kelahiran per wanita usia subur (WUS) 15-49 Tahun	2,11	2,10		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	03 - Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	01- Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,421	0,394		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		69,51 (2023)	73,83		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03- Indeks Pembangunan Pemuda		62,88	67,69		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04- Indeks Pembangunan Gender		91,85	92,11-92,21		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		05- Indeks Perlindungan Anak		68,29 (2023)	72,33		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06- Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	persen	92,94 (2023)	94,50		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		07- Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	persen	68,42 (2023)	69,50		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	04 - Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	01- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,91	4,44-4,96		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02- Peringkat Indeks Inovasi Global	peringkat	54	52		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	05 - Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	01- Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	medali	2	n/a		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02- Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	medali	1	n/a		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03- Peringkat pada Asian Games	peringkat	13 (2023)	9-11		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Peringkat pada Asian Para Games	peringkat	6 (2023)	5-7		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		05- Peringkat pada SEA Games	peringkat	3 (2023)	n/a		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06- Peringkat pada ASEAN Para Games	peringkat	1 (2023)	1-2		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		07- Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	persen	9,06	10,80 - 11,94		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar	01- Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	persen	67,07	68,07	62.534.738,20	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	13 tahun yang berkualitas (1 tahun pendidikan pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	02- Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	anak tidak sekolah	3.777.202	3.546.145		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03- Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD	persen	63,81	64,60		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	01 - Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	01- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	36,03	36,74	1.016.750,32	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	01- Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	26,67	35,60	28.568.407,54	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	42,09	50,08		025 - Kementerian Agama
04.01.03 KP: Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran	01 - Terwujudnya perluasan kesempatan belajar untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin	01- Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya		0,765	0,794	26.436.860,08	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02- Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Ulama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha	persen	68,63	72,32		025 - Kementerian Agama
04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	01- Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	anak	(indikator baru)	306.510	6.512.720,27	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	anak	261.197	261.397		025 - Kementerian Agama
	02 - Meningkatnya akses anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin terhadap pendidikan, pengasuhan, dan layanan kesejahteraan sosial melalui Sekolah Rakyat	01- Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat	orang	(indikator baru)	30.000		027 - Kementerian Sosial
04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Terwujudnya kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif	01- Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	46,57; 41,42	51,67; 45,68	3.470.761,52	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	persen	48,17	48,59		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		03- Early Childhood Development Index (ECDI)		87,70	89,06		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04- Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	persen	0	75		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.02.01 KP: Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi	01 - Terwujudnya pembelajaran yang inovatif, serta meningkatkan minat	01- Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	15,69	17,07	446.329,81	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	dan motivasi belajar peserta didik	02- Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	30,50	33,98		025 - Kementerian Agama
04.02.02 KP: Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas, termasuk Peningkatan Kecakapan Literasi Kelas Awal, serta Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik	01 - Terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan mampu mengembangkan kompetensi sebagai masyarakat yang aktif	01- Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar	persen	18,15	54,46	0	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02- Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	persen	10,08	30,02		025 - Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.02.03 KP: Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif	01 - Terwujudnya peserta didik yang kompeten dan mampu mengaplikasikan materi-materi pembelajaran	01- Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	68,13; 62,51 (2023)	70,62; 69,35	328.376,14	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02- Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	58,07; 50,91 (2023)	59,71; 52,97		025 - Kementerian Agama
04.02.04 KP: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	01 - Terwujudnya tumbuh kembang anak usia dini secara optimal dalam mendukung kualitas belajar anak	01- Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI	persen	50,19	79,38	57.233,50	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.02.05 KP: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	01 - Tercapainya peningkatan kualitas dan pemahaman ilmu agama pada peserta didik untuk diterapkan dalam kehidupan	01- Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	persen	41,96	63,94	0	025 - Kementerian Agama
		02- Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	persen	54,67	70,35		025 - Kementerian Agama
04.02.06 KP: Penerapan Kurikulum yang Kontekstual Berpusat pada Peserta Didik serta Fokus pada Karakter dan Kompetensi Esensial	01 - Terwujudnya pembelajaran yang memuat aspek mendasar dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan	01- Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	83,94	91,98	216.852,07	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02- Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	50,21	55,21		025 - Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	01 - Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	01- Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi	unit	(indikator baru)	4	2.421.970,00	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina	unit	(indikator baru)	15		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.02.08 KP: Revitalisasi Pendidikan Nonformal	01 - Tercapainya peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dan menjamin pendidikan kesetaraan sebanding dengan pendidikan formal	01- Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	22,01	26,85	0	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	01 - Terwujudnya layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	01- Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	persen	56,00	75,00	304.069,12	025 - Kementerian Agama
		02- Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	persen	(indikator baru)	15,00		025 - Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.03.01 KP: Peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Meningkatnya kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01- Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	persen	(indikator baru)	40,00	284.069,12	025 - Kementerian Agama
04.03.02 KP: Rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Terpenuhinya rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01- Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	persen	32	60	0	025 - Kementerian Agama
04.03.03 KP: Penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Terwujudnya penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01- Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	persen	(indikator baru)	15,00	20.000,00	025 - Kementerian Agama
04.04 PP: Penguatan Pengelolaan	01 - Terwujudnya peningkatan	01- Indeks Pemerataan Guru		36,91	34,91	15.757.069,79	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	02- Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	persen	35,21 (2023)	44,84		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.04.01 KP: Reformasi Pendidikan Keguruan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	01 - Menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan dan profesi guru	01- Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi	persen	94,24 (2022)	98,56	716.471,66	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul	persen	0 (2022)	2,5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya proporsi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	01- Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	persen	57,94	85,06	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	persen	38,91 (2023)	60,43		025 - Kementerian Agama
04.04.02 KP: Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	01 - Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran	01- Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	persen	32,61	47,83	15.040.598,13	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02- Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik	persen	80,00	81,70		025 - Kementerian Agama
04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	01 - Terselenggaranya sistem tata kelola pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta	01- Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	persen	62,80	65,34	1.531.913,92	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	reputasi kelembagaan pendidikan	02- Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B	persen	64,94 (2023)	69,38		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.05.01 KP: Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan	01 - Terwujudnya lembaga pendidikan yang ideal, mandiri, dan berintegritas	01- Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	54,06 (2023)	62,44	90.359,04	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02- Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	41,79	43,40		025 - Kementerian Agama
04.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Khususnya Terkait Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Terwujudnya kolaborasi yang bersinergi dan berkualitas dalam peningkatan mutu pendidikan	01- Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	persen	42,75	67,75	722.087,94	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.05.03 KP: Penguatan Sistem Penjaminan Mutu	01 - Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan	01- Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	persen	89,67 (2023)	98,97	719.466,95	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02- Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	persen	30,48	37,71		025 - Kementerian Agama
04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM)	01 - Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan berkembangnya STEAM di pendidikan tinggi	01- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	persen	32,00	34,92	19.862.346,55	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau Wirausaha;	persen	(a) 62,21; (b) 79,86	(a) 62,95; (b) 84,22		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03- Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul	persen	23,59 (2020)	29,93		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas	persen	92,65 (2020)	93,80		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05- Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar	persen	40,67 (2022)	44,91		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		06- Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM	persen	28,36	29,51		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.01 KP: Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	01 - Meningkatnya relevansi dan partisipasi pendidikan tinggi	01- Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)		0,34	0,49	19.134.317,01	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31%	provinsi	23	24		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03- Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan	bulan	7,20	6,75		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Rasio Outbound per Inbound mahasiswa	persen	6,50 (2018)	7,32		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	persen	39,25	33,49		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.02 KP: Pengembangan STEAM	01 - Menguatnya bidang STEAM di perguruan tinggi	01- Proporsi Program Studi STEM	persen	43,45 (2022)	48,98	176.206,79	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM	persen	a. 14,97; b.14,90; c. 15,02 (2022)	a.17,58; b.17,53; c.17,63		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.03 KP: Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi Sebagai Rumah Masyarakat Ilmiah	01 - Meningkatnya kualitas kelembagaan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah	01- Proporsi perguruan tinggi terakreditasi	persen	59,55 (2022)	64,46	17.550,00	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	perguruan tinggi	11 (2023)	13		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Dosen	01 - Terwujudnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi dosen	01- Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM	persen	Total: 18,18 (2021); STEM: 16,01 (2021); Non STEM: 19,93 (2021)	Total: 22,34; STEM: 19,79; Non STEM: 24,36	534.272,75	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen	persen	50,12 (2023)	51,85		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kapasitas	orang	16.551 (2023)	17.500		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	01 - Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing yang relevan dengan kebutuhan industri	01- Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	persen	42,51	46,38	3.390.380,54	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	persen	1,63 (2023)	1,60		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.01 KP: Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi	01 - Terwujudnya lulusan pendidikan menengah vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01- Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	persen	44,40	46,65	1.115.799,71	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.07.02 KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi	01 - Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01- Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausaha	persen	(a) 60,98; (b) 4,78	(a) 74,75; (b) 5,00	1.321.620,03	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.07.03 KP: Penguatan Pelatihan Vokasi	01 - Terwujudnya kegiatan pelatihan vokasi dan ketenagakerjaan yang produktif dan sesuai kebutuhan industri bagi lulusan vokasi	01- Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha	persen	42,53	45,00	887.226,30	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.04 KP: Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	01 - Terciptanya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	01- Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	61,90	63,60	65.734,50	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02- Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	orang	11.797.247	15.389.510		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03- Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan	perusahaan	560.773	536.822		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.08 PP: Peningkatan Kontribusi	01 - Meningkatnya proporsi anggaran iptek	01- Pengeluaran Iptek dan Inovasi	persen PDB	0,28 (2020)	0,31	5.100.633,39	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	dan inovasi terhadap PDB untuk mendukung pembangunan nasional	02- Proporsi anggaran litbang non pemerintah/ swasta	persen	12,5 (2020)	27	1.157.890,05	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03- Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000	perguruan tinggi	a) 6; b) 12; c) 22	a) 8; b) 13; c) 23;		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.08.01 KP: Penguatan kapasitas Iptek dan inovasi	01 - Meningkatnya Kualitas SDM Iptek dan inovasi	01- Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) per juta penduduk	SDM Iptek/ juta penduduk	1.242	1.292	1.157.890,05	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	persen	(indikator baru)	30		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03- Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index $\geq$ 10	persen	0,12	0,20		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		04- Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset	KI/100 Periset	1,62	5,54		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Iptek dan Inovasi	01- Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun	infrastruktur	8	3		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.02 KP: Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Meningkatnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi	01- Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	(indikator baru)	5	2.664.165,01	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	01- Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal	lembaga	(indikator baru)	5		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	03 - Meningkatnya peran Science Techno Park (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	01- Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5	5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02- Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa	lembaga	(indikator baru)	0		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03- Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi	miliar Rupiah	(indikator baru)	75		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Jumlah startup binaan yang produktif	startup	(indikator baru)	4		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05- Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN	hub	(indikator baru)	1		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		06- Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN	miliar Rupiah	(indikator baru)	50		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	04 - Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas	01- Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk	lembaga	(Indikator baru)	1		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.03 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi secara masif di berbagai Bidang termasuk Pengawasan Ketenaganukliran	01 - Meningkatnya pemanfaatan iptek dan inovasi	01- Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas	produk	(indikator baru)	40	560.805,30	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Meningkatnya kerjasama iptek dan inovasi dengan mitra/ industri	01- Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas	kerjasama	(indikator baru)	30		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.04 KP: Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	01 - Terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat	01- Indeks QS International Research Network Collaboration 02- Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-index		15,50 a) 6,07; b) 318	21,88 a) 2,61; b) 318	717.773,03	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03- Jumlah paten granted dari perguruan tinggi	paten	17.706	20.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04- Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	produk	82.051	89.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.09 PP: Pengembangan	01 - Terwujudnya talenta riset inovasi, seni budaya, dan	01- Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional	orang	95	103	870.706,11	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Manajemen Talenta Nasional (MTN)	olahraga yang memperoleh rekognisi di tingkat nasional dan internasional	02- Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional	karya seni budaya	15 (2023)	18		140 - Kementerian Kebudayaan
		03- Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional	persen	73,38 (2023)	76-80		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04- Peringkat pada Youth Olympic Games	peringkat	83 (2018)	81-83		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05- Peringkat pada Asian Youth Games	peringkat	15 (2013)	n/a		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		06- Peringkat pada Asian Youth Para Games	peringkat	5 (2021)	n/a		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.09.01 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	01 - Meningkatnya rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta	01- Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	talenta seni budaya	97 (2023)	126	359.242,35	140 - Kementerian Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	penyelenggaraan ajang dan non ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia	02- Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	festival dan pameran seni budaya	6	8		140 - Kementerian Kebudayaan
		03- Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	persen	31,49	34,07		140 - Kementerian Kebudayaan
04.09.02 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	01 - Terciptanya SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional	01- Rasio SDM Iptek per satu juta penduduk	SDM Iptek/1 juta penduduk	1.151 (2023)	1.379	175.344,69	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02- Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan 2% ilmuwan top dunia	orang	150	187		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03- Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenisnya di tingkat pelajar dan mahasiswa	peraih	100 (2023)	188		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	01 - Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	01- Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandarisasi	provinsi	16 (2023)	19	216.110,87	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Kabupaten/Kota dengan PPLP yang Terbentuk	kabupaten/ kota	24 (2023)	34		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03- Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	persen	(indikator baru)	15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04- Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	persen	(indikator baru)	15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05- Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games	medali	1 perunggu (2018)	1 emas		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		06- Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	medali	1 emas/2 perak/2 perunggu (2013)	n/a		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		07- Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	medali	12 emas/11 perak/14 perunggu (2021)	n/a		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.09.04 KP: Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)	01 - Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akuntabel dan berkelanjutan	01- Persentase Kementerian/Lembaga anggota gugus tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang melaksanakan Desain Besar MTN	persen	35,29	70,59	120.008,20	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	01 - Terwujudnya masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta	01- Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK		60,49 (2023)	64,36	50.382,20	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.10.01 KP: Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	01 - Terwujudnya Layanan Perpustakaan yang berkualitas untuk menguatkan Budaya Literasi, Kreativitas dan Inovasi	01- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		69,42 (2023)	71	37.721,18	057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.10.02 KP: Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Meningkatnya Budaya Kegemaran Membaca	01- Tingkat Kegemaran Membaca		66,67 (2023)	72,50	12.661,02	057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01 - Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat berbasis siklus hidup melalui penguatan edukasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat	01- Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	189 (2020)	109	75.735.513,70	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	19,83 (2020)	13,80		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	persen	19,80	17,50		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Prevalensi remaja putri anemia	persen	(indikator baru)	23		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	persen	(indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		06- Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	74,30 (2023)	77		024 - Kementerian Kesehatan
		07- Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied by modern methods)	persen	83,9	85,3		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		08 - Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	persen	(indikator baru)	46		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.01 KP: Penurunan kematian ibu dan anak	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata	01- Persentase persalinan di fasyankes	persen	76,66	89,00	143.889,82	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase kabupaten/kota dengan RS PONEK sesuai standar	persen	19,45 (2023)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONEK sesuai standar	persen	(indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	laksana balita sakit, serta imunisasi	04- Persentase kabupaten/kota dengan CFR <i>direct obstetric</i> (eklamsi & pendarahan postpartum) < 1%	persen	(indikator baru)	35,00		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	persen	(indikator baru)	82		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12T)	persen	(indikator baru)	66,00		024 - Kementerian Kesehatan
		07- Persentase anemia pada ibu hamil	persen	27,7 (2023)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		08- Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan	persen	49,2 (2023)	55		024 - Kementerian Kesehatan
		09- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1000 perempuan	18,00	17,88		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		10- Cakupan KF lengkap sesuai standar	persen	26,8 (2023)	45		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		11- Persentase KB Pasca Persalinan	persen	48,9	60		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		12- Angka kematian neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	9,30 (2020)	8,4		024 - Kementerian Kesehatan
		13- Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	16,85 (2020)	11,63		024 - Kementerian Kesehatan
		14- Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	persen	90,77 (2023)	92		024 - Kementerian Kesehatan
		15- Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	75 (2023)	85		024 - Kementerian Kesehatan
		16- Cakupan Anak Usia 12- 23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	persen	63,69	85,00		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.11.02 KP: Pencegahan dan penurunan stunting	02 - Terwujudnya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting melalui pendekatan spesifik dan sensitif	01- Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	persen	7,40	7,70	72.827.654,91	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)	persen	11,1 (2023)	10,5		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	persen	9,67 (TW I 2025)	13		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	persen	68,6 (2023)	76		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	persen	55,5 (2023)	64		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Persentase anak usia 6- 23 bulan mendapatkan MPASI	persen	60,90 (2023)	76,00		024 - Kementerian Kesehatan
		07- Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	persen	23,04 (TW I 2025)	55		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		08- Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)	persen	74,20 (2023)	80,00		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.11.03 KP: Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah	01- Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD	persen	61,3 (2023)	67	169.860,83	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia produktif	01- Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	persen	(indikator baru)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		02- Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	10.200 (2023)	20.000		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	persen	(indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	03 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia	01- Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	47,22 (2022)	55		024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase puskesmas santun lansia	persen	69	75		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	persen	11,01 (2023)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)	persen	(indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
	04 - Meningkatnya pelayanan KB dan kespro	01- Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	persen	61,7	61,9		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
		02- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB)	persen	11,1	10		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03- Persentase peseta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	25,5	26,0		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		04- Persentase Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP	persen	(indikator baru)	35		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.04 KP: Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	01 - Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit,	01- Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	persen	(indikator baru)	60	2.594.108,14	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	persen	(indikator baru)	70		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	03- Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	persen	(indikator baru)	55		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	persen	(indikator baru)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	persen	(indikator baru)	45		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	persen	(indikator baru)	55		024 - Kementerian Kesehatan
04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	01 - Terlaksananya pemberian makan bergizi gratis bagi anak balita, ibu hamil, ibu	01- Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	persen	87,3 (2023)	88,56	250.549.424,02	128 - Badan Gizi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	menyusui, dan anak sekolah untuk mencapai pemenuhan gizi	02- Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	persen	75,03 (2023)	75,39		128 - Badan Gizi Nasional
		03- Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	persen	(indikator baru)	92		128 - Badan Gizi Nasional
		04- Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	persen	(indikator baru)	100		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.01 KP: Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	01 - Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01- Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	50	249.048.088,67	128 - Badan Gizi Nasional
		02- Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	50		128 - Badan Gizi Nasional
		03- Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	16		128 - Badan Gizi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/ sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	86		128 - Badan Gizi Nasional
		05- Persentase siswa SD/MI/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	86		128 - Badan Gizi Nasional
		06- Persentase siswa SMP/MTs/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	85		128 - Badan Gizi Nasional
		07- Persentase siswa SMA/MA/SMK/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	85		128 - Badan Gizi Nasional
		08- Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	100		128 - Badan Gizi Nasional
		09- Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	(indikator baru)	41		128 - Badan Gizi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		10- Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	persen	(indikator baru)	60		128 - Badan Gizi Nasional
		11- Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	persen	(indikator baru)	60		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01- Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	sistem	(indikator baru)	1	1.501.335,35	128 - Badan Gizi Nasional
		02- Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	persen	(indikator baru)	100		128 - Badan Gizi Nasional
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	01 - Meningkatnya Pengendalian Penyakit melalui upaya pencegahan, penemuan kasus, dan penuntasan pengobatan	01- Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	per 100.000 penduduk	387 (2023)	252	2.587.356,65	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	6	19		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	desa	16	21		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Insidensi HIV	per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,10 (2023)	0,08		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	kab/kota	389 (2023)	440		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Persentase Diabetes dalam Pengendalian	persen	(indikator baru)	17,5		024 - Kementerian Kesehatan
		07- Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	persen	18,9	25		024 - Kementerian Kesehatan
		08- Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	kab/kota	(indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		09- Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun	persen	1,4 (2023)	1,4		024 - Kementerian Kesehatan
		10- Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	(indikator baru)	100		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya kesadaran dan	01- Prevalensi obesitas >18 tahun	persen	23,4 (2023)	23,4		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	partisipasi masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, serta pembangunan berwawasan kesehatan	02- Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	persen	12,4 (2023)	11,4		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.01 KP: Penuntasan TBC	01- Meningkatnya Upaya Pencegahan Penemuan Kasus dan Pengobatan TBC Hingga Tuntas	01- Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	persen	81,00	90,00	2.341.961,64	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Treatment Success Rate)	persen	85,00	90,00		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah	persen	19,20	80,00		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan	persen	92,00	95,00		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit Kusta & Schistosomiasis	01- Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	persen	84,36	86	63.374,64	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	persen	84,97 (2023)	90		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	persen	9,60	<5		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) untuk schistosomiasis	persen	83,6 (2023)	90,4		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.03 KP: Pengendalian penyakit menular lainnya	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit menular lainnya	01- ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	persen	70 (2023)	90	11.576,27	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5%	kab/kota	333 (2023)	425		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.04 KP: Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	01- Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60%	kab/kota	32	70	-	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	(indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	persen	(indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	persen	(indikator baru)	40		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Cakupan imunisasi HPV	persen	6	90		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pengendalian gangguan jiwa	01- Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	persen	6 (2023)	15		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.05 KP: Pembudayaan hidup sehat dan Pengendalian faktor risiko PTM	01 - Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	01- Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	62,6 (2023)	68	116.223,96	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	persen	36,3 (2023)	40,3		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	persen	15 (2023)	17		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR	kab/kota	367	427		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan UBM	kab/kota	228 (2023)	325		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	persen	(indikator baru)	6		024 - Kementerian Kesehatan
		07- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	persen	(indikator baru)	77		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
04.13.06 KP: Penyehatan Lingkungan	01 - Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan	01- Kab/Kota degan kualitas Air Minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	150	54.220,15	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/Kota)	kab/kota	(indikator baru)	100		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	kab/kota	4 (2023)	60		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Kabupaten/kota sehat	kab/kota	136	228		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.14 PP: Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	01 - Meningkatkan kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re- emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon secara efektif dan cepat	01- Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah	persen	37,16 (2023)	50	5.719.310,27	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	persen	90 (2023)	96		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Jumlah KLB keracunan pangan	kejadian	291	200		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Jumlah kab/kota eliminasi rabies	kab/kota	418	440		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	persen	62 (TW III 2024)	70		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	73,8		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07- Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar	persen	(indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.14.01 KP: Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana	01 - Meningkatkan pengendalian KLB/ wabah dan penanganan bencana dengan fokus pada penguatan sistem surveilans, laboratorium, & pos pintu masuk negara	01- Kab/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	kab/kota	452 (2023)	472	1.264.631,42	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	persen	(indikator baru)	70		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	70 (2023)	76		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	40 (2023)	54		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies	kab/kota	(indikator baru)	162		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		06- Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	kab/kota	259	288		018 - Kementerian Pertanian
04.14.02 KP: Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba	01- Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	persen	61,96 (TW II 2024)	70	4.062.994,28	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes	persen	(indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	(indikator baru)	92		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	persen	(indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	(indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.14.03 KP: Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	01- Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	kab/kota	(indikator baru)	100	391.684,57	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	kab/kota	(indikator baru)	100		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	persen	13 (2023)	28		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		04- Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	persen	77,8 (2023)	79		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		05- Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	73,3 (2023)	76		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		06- Persentase Obat yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	91		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07- Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	66		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		08- Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	70		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		09- Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	persen	(indikator baru)	63		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		10- Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	persen	(indikator baru)	95		024 - Kementerian Kesehatan
04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	01 - meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di hingga tingkat desa, pendekatan khusus pelayanan bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta, serta meningkatkan	01- Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	persen	1,17 (2023)	30	69.588.073,91	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	persen	12	22		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	persen	98,42	98,70		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	kualitas pendanaan kesehatan	04- Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	63	71		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	persen	4,0 (2023)	3,96		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Pengeluaran Kesehatan Total per kapita	juta	2,1 (2023)	2,4		024 - Kementerian Kesehatan
		07- Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	persen	(indikator baru)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		08- Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	46,72	55		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.15.01 KP: Investasi pelayanan kesehatan primer	01 - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	01- Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar	persen	<30,00	40,00	1.419.629,74	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	persen	18,00	35,00		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	(indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar	persen	18.5 (Des 2024)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	30	60		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	30	40		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		07- Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persen	28,00	28,00		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.02 KP: Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	01 - Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	01- Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	persen	31,5	60	8.801.203,15	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	persen	7,80	45,00		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	(indikator baru)	16		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Kabupaten/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	kab/kota	26 (2023)	30		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	kab/kota	65	90		024 - Kementerian Kesehatan
		06- Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	40,00	60,00		024 - Kementerian Kesehatan
		07- Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	kab/kota	(indikator baru)	32		024 - Kementerian Kesehatan
		08- Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	RS	3	10		024 - Kementerian Kesehatan
		09- Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persen	37,00	45,00		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.15.03 KP: Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	01 - Meningkatkan pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan	01- Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar	kab/kota	6	37	73.005,22	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Jumlah Kab/Kota dengan Jenis Dokter Spesialis pada RS Pemerintah sesuai Standar	kab/kota	250	290		024 - Kementerian Kesehatan
		03- Rasio dokter spesialis	per 1.000 penduduk	0,18	0,2		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase SDMk yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	persen	11,38	20		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul	persen	2,06 (2020)	17,37		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.15.04 KP: Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan	01 - Memperkuat kapasitas JKN dan pendanaan kesehatan dalam mendukung	01- Cakupan kepesertaan aktif JKN	persen	76,5 (2023)	80,5	58.965.000,00	BPJS Kesehatan
		02- Jumlah kepesertaan segmen PBI	juta jiwa	96,7 (2023)	96,8		027 - Kementerian Sosial



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	pembangunan kesehatan	03- Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional	persen	(indikator baru)	86		BPJS Kesehatan
		04- Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan	angka	2,92 (prognosis 2024)	1,5 - 6		BPJS Kesehatan
		05- Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	persen	11,9 (2023)	5		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.05 KP: Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan	01 - Menguatnya tata kelola, data, informasi dan teknologi kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	01- Persentase Provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah	persen	(indikator baru)	75	329.235,81	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	persen	(indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	persen	49	70		024 - Kementerian Kesehatan
		04- Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	persen	15	30		024 - Kementerian Kesehatan
		05- Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	layanan	2	7		024 - Kementerian Kesehatan
04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	01 - Menguatnya ketangguhan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak individu dalam keluarga dan mendorong terbentuknya modal sosial	01- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		62,4	65,8	213.597,19	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02- Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,3	22,5		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.16.01 KP: Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak	01 - Menguatnya kemampuan keluarga dalam penanaman nilai moral, etika, integritas, karakter dan pengembangan psikososial anak	01- Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	persen	55,06	56,16	16.883,33	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02- Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	persen	(indikator baru)	51		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03- Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	persen	32,38	51,00		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		04- Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja		84,60	85,70		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	persen	20,50	19,01		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06- Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	persen	9,02	8,76		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.16.02 KP: Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga	01 - Meningkatnya fasilitas pendukung dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi keluarga	01- Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	persen	65,97	75,00	43.468,48	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02- Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	persen	(indikator baru)	20		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.16.03 KP: Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan	01 - Terjaminnya aspek legalitas, hukum dan ekonomi bagi keluarga rentan	01- Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga		54,0	56,41	153.245,38	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02- Indeks Kerentanan Keluarga		8,5	8,4		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	01- Indeks Pemenuhan Hak Anak		65,58 (2023)	69,74	28.161,25	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02- Indeks Perlindungan Khusus Anak		79,91 (2023)	83,42		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03- Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	94,52	97		010 - Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 31,11; perempuan: 36,31	laki-laki: 24,63; perempuan: 31,06		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05- Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	persen	2,37	2,48		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.17.01 KP: Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak	01 - Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Universal, Meningkatnya Kapasitas dan Resiliensi Anak serta Menguatnya Kelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak	01- Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun	persen	70	73,0	11.810,00	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		02- Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kab/kota	KLA: 0; Utama: 22; Nindya: 69; Madya: 125; Pratama: 139;	KLA: 0; Utama: 21; Nindya: 78; Madya: 134; Pratama: 145		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03- Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	persen	77,89	78,16		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
		04- Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	persen	7,28	6,83		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05- Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	kab/kota	280 (2023)	358		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.17.02 KP: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak melalui Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, Data, dan Koordinasi Lintas Sektor	01- Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	persen	5,90	5,18	16.351,25	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02- Angka pekerja anak usia 5-17 tahun	persen	2,17	1,77		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03- Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	46,81	85		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04- Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 2,18; perempuan: 2,17	laki-laki: 1,48; perempuan: 2,03		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
		05- Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 1,83; perempuan: 2,67	laki-laki: 1,33; perempuan: 2,02		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06- Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 27,03; perempuan: 33,07	laki-laki: 21,42; perempuan: 27,99		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07- Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	persen	12,64	12,22		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	01 - Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Partisipasi Aktifnya di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Politik	01- Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	persen	63,03	68,55	102.052,28	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Angka Kesakitan Pemuda	persen	6,80	5,91		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03- Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	persen	10,77	10,49		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Persentase Usia Muda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	persen	23,78	23,58		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05- Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	persen	80,67	81,21		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.01 KP: Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Meningkatnya kualitas individu pemuda yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan; penguatan karakter, dan tercegahnya perilaku berisiko pada pemuda	01- Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat	persen	17,31	29,63	33.460,21	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	persen	97,25	97,47		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03- Persentase pemuda yang merokok	persen	25,56	23,65		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04- Persentase Pemuda berolahraga	persen	31,92	41,06		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.02 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi khususnya partisipasi	01- Persentase pemuda pekerja tidak penuh	persen	32,90	30,42	45.262,07	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Rasio Kewirausahaan Pemuda	persen	1,13	1,40		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	aktif dalam ketenagakerjaan	03- Persentase pemuda disabilitas yang bekerja	persen	20,04	20,08		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04- Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki- laki	persen	69,04	69,09		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	01 - Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan khususnya partisipasi aktif di bidang sosial dan politik	01- Persentase pemuda (16- 30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	persen	6,16	6,17	23.330,00	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	persen	1,19	1,55		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan	01- Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	persen	0,094	0,072	117.045,05	024 - Kementerian Kesehatan
		02- Persentase Anggota Legislatif	persen	laki-laki: 77,54; perempuan: 22,46	laki-laki: 77,29; perempuan: 22,71		076 - Komisi Pemilihan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	persen	laki-laki: 43,78; perempuan: 37,64	laki-laki: 44,56; perempuan: 38,60		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	56,42	56,40 - 59,31		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		05- Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	persen	6,6	5,9		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06- Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	laki-laki: 17.345; perempuan: 9.922	laki-Laki: 18.037; perempuan: 10.135		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		07- Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	KL: 3; provinsi: 2; kab/kota: 3	KL: 7; provinsi: 6; kab/kota: 11		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.01 KP: Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan	01 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan	01- Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	persen	0,248	0,231	7.201,21	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	persen	87,29	87,76		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.19.02 KP: Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	01 - Meningkatnya kapasitas, kemandirian, kepemimpinan, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, didukung oleh penguatan kebijakan, akses sumber daya, dan norma sosial budaya yang mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam pembangunan	01- Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya	persen	pratama 14; madya 16	pratama 15; madya 17	71.500,00	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02- Persentase Perempuan di Posisi Managerial	persen	35,02	40,23		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03- Persentase Perempuan Kepala Desa	persen	5,76	6,76		010 - Kementerian Dalam Negeri
04.19.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas, akses	01- Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan	persen	22,09	20	6.105,44	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02- Rasio Kewirausahaan Perempuan	persen	1,70 (2023)	1,89		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	terhadap peluang kerja, dan ekosistem kewirausahaan serta penguatan kebijakan yang ramah perempuan dan keluarga	03- Pilar Literasi Digital pada IMDI	persen	laki-laki: 3,56; perempuan: 3,52 (2023)	laki-laki: 3,65; perempuan: 3,64		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
04.19.04 KP: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan	01 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, data, koordinasi lintas sektor, serta kesadaran dan perubahan norma sosial budaya	01- Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	persen	3,70	3,49	19.538,40	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02- Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	5,70	5,42		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03- Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	persen	18	16,69		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
		04- Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	persen	75,41	79,61		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05- Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP	persen	46,3	41,42		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06- Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persen	49,25 (2023)	85,00		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	orang	26.161 (2023)	31.655-33.094		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan	01 - Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dalam pembangunan	01- Persentase Anggaran Responsif Gender	persen	K/L: 4,04 ; prov/kab/kota :10,0	K/L: 6,40 ; prov/kab/kota: 12,4	12.700,00	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02- Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender	persen	K/L: 3,80	K/L: 5,50		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender	prov/kab/kota	(indikator baru)	prov: 14; kab/kota: 38		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat	01- Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia	persen	(indikator baru)	61,5	375.151,53	027 - Kementerian Sosial
		02- Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas	persen	(indikator baru)	39,80		027 - Kementerian Sosial
04.20.01 KP: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Terpenuhinya Akses Layanan Dasar dan Terlindunginya dari Kekerasan bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01- Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan	persen	99,55 (2023)	99,65	372.326,04	027 - Kementerian Sosial
		02- Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	persen	8,19	12,00		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	12,33	13,82		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.20.02 KP: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kebijakan pembangunan	01- Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan	persen	73,00 (2023)	80,00	2.825,49	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02- Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan	persen	18,00 (2023)	35,00		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Regional dan Internasional	01- Jumlah perolehan medali pada SEA Games	medali	87 emas/ 80 perak/ 109 perunggu (2023)	n/a	760.612,42	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	medali	159 emas/ 148 perak/ 94 perunggu (2023)	159 emas/ 148 perak/ 94 perunggu		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Jumlah perolehan medali pada Asian Games	medali	7 emas/ 11 perak/ 18 perunggu (2023)	7 emas/ 11 perak/ 18 perunggu		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04- Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games	medali	29 emas/ 30 perak/ 36 perunggu (2023)	29 emas/ 30 perak/ 36 perunggu		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.01 KP: Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul	01 - Terbinanya Olahragawan Talenta Unggul yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional	01- Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiade	orang	291	210	212.965,55	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	100 (2023)	100		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03- Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade	orang	182 (2023)	750		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	22 (2023)	140		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05- Jumlah Olahragawan Elite Nasional Level Dunia pada Cabang Olahraga Unggulan Paralimpiade	orang	59	100		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.02 KP: Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional	01 - Terbinanya Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional	01- Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional	orang	300	325	25.152,23	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	orang	171	171		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03- Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	lembaga	20	20		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.21.03 KP: Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	01 - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	01- Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	lembaga	11 (2023)	11	298.365,64	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade	lembaga	548 (2023)	548		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.04 KP: Peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga	01 - Meningkatkan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga kelas dunia	01- Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20	224.129,00	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	01 - Meningkatkan Budaya Berolahraga di Masyarakat	01- Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	persen	33,62	39,41	56.802,50	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
04.22.01 KP: Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas	01 - Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga melalui pengembangan olahraga pendidikan dan penyandang disabilitas	01- Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga setiap minggu terakhir	persen	48,76 (2021)	74,13	6.378,50	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga setiap minggu terakhir	persen	8,24 (2021)	12,53		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.02 KP: Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri	01 - Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dan industri olahraga	01- Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	persen	100	100	50.424,00	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02- Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun	persen	3,29	3,90		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM  
UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05 PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	01- Rasio PDB Industri Pengolahan	persen	18,98	21,20	17.704.062,70	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	02 - Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	01- Biaya Logistik	persen PDB	14,29 (2022)	13,3		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02- Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen PDB	29,15	29,0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		03- Ekspor Barang dan Jasa	persen PDB	22,18	22,0		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Prioritas	01- Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	persen	4,43	5,20-5,84	5.410.346,54	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.01 KP: Pengembangan Hilirisasi Nikel	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Nikel	01- Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel	juta ton/tahun	27,44	33,74	21.875,00	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel	juta Rupiah	113.770.000	55.200.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai	01- Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga	ribu ton/tahun	375	1.195	3.648,96	019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.01.02 KP: Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Tambah dan Daya Saing Industri Tembaga	02- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga	juta Rupiah	45.720.000	48.078.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.03 KP: Pengembangan Hilirisasi Bauksit	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Bauksit	01- Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit	juta ton/tahun	5,02	15,27	5.600,00	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit	juta Rupiah	10.790.000	12.866.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.04 KP: Pengembangan Hilirisasi Timah	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Timah	01- Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah	ribu ton/tahun	136,9	247,3	-	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah	juta Rupiah	500.000	520.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.05 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	01 - Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan	01- Produksi Kelapa Sawit	ton	226.069.542,9	243.241.575	79.678,77	018 - Kementerian Pertanian
		02- Ragam Produk Hilir Sawit	produk	193	223		019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Diversifikasi Kelapa Sawit	03- Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO)	ton	52.518.781 (angka sementara)	53.817.198		018 - Kementerian Pertanian
		04- Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku	persen	92,0	92,5		019 - Kementerian Perindustrian
		05- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit	juta Rupiah	44.090.000	1.659.739		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	01 - Terwujudnya Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Utilisasi Industri Kelapa	01- Produktivitas Kelapa	ton/hektare	1,12 (angka sementara)	1,14	3.793.993,26	018 - Kementerian Pertanian
		02- Produksi Kelapa	ton	2.822.118 (angka sementara)	2.890.917		018 - Kementerian Pertanian
		03- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa	juta Rupiah	4.492.915	454.674		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa	persen	40	60		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.07 KP: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	01 - Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rumput Laut	01- Volume Produksi Rumput Laut	juta ton	10,81	12,22	123.000,00	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut	juta Rupiah	230.000	532.800		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		03- Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut	persen	49,51	58,01		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.08 KP: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	01 - Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Sagu dan Singkong	01- Produksi Sagu	ton	395.403 (angka sementara)	413.304	772.231,69	018 - Kementerian Pertanian
		02- Kapasitas Produksi Pati Sagu	ton/tahun	60.000	150.000		019 - Kementerian Perindustrian
		03- Produksi Ubi Kayu	ton	16.927.504	17.529.989		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Produktivitas Sagu	ton/hektare	2,97 (angka sementara)	3,14		018 - Kementerian Pertanian
		05- Produktivitas Ubi Kayu	ton/hektare	26,83	28,25		018 - Kementerian Pertanian
05.01.09 KP: Pengembangan Industri Kimia	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Kimia	01- Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara	ribu ton	59.783,45	60.444,74	44.724,08	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	persen	-0,98 (2023)	6,51		019 - Kementerian Perindustrian
		03- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi	juta Rupiah	17.460.000,00	39.843.024,52		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi	juta Rupiah	16.114.108,34	23.399.871,54		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.01.10 KP: Pembangunan Industri Semikonduktor	01 - Terwujudnya Pertumbuhan Industri Semikonduktor	01- Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	persen	6,16	6,82-7,26	22.916,64	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika	juta Rupiah	1.290.000	1.561.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.11 KP: Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Kosmetik dan Farmasi	01- Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	persen	1,85 (2023)	11,48	16.657,57	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	43	58		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.01.12 KP: Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Terwujudnya Pertumbuhan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01- Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat	persen	0,94 (2023)	1,1	36.518,13	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.13 KP: Pengembangan Industri Dirgantara	01 - Terwujudnya Pertumbuhan Industri Dirgantara	01- Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	persen	50	63,25	27.000,00	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.14 KP: Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	01 - Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Industri Mesin dan Perlengkapan	01- Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan	persen	-0,42	2,93-3,47	3.850,00	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Proporsi Jenis Alkes yang dapat Diproduksi Dalam Negeri	persen	56	65		024 - Kementerian Kesehatan
05.01.15 KP: Peningkatan Industri Makanan dan Minuman	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Padat Karya Terampil pada Industri Makanan Minuman	01- Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman	persen	5,9	6,05-6,60	6.250,00	019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.01.16 KP: Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	01 - Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil	01- Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	persen	4,26	4,64-4,94	444.829,97	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT	juta Rupiah /orang/tahun	55,29	64,59		019 - Kementerian Perindustrian
		03- Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT	orang	3.975.905	3.957.206		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.17 KP: Pengembangan Industri Alas Kaki	01 - Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Industri Alas Kaki	01- Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	persen	6,83	6,49-6,81	1.500,00	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.18 KP: Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	01 - Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Logam Dasar Besi dan Baja	01- Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar	persen	13,34	8,71-9,47	5.672,48	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Utilisasi Industri Logam Dasar	persen	76,76	79		019 - Kementerian Perindustrian
		03- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja	juta Rupiah	9.600.000	10.765.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Jasa Industri Dalam Negeri untuk Mendukung Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	01- Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional	persen	2,72 (2016)	3,18	400,00	019 - Kementerian Perindustrian
05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	01 - Terwujudnya Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	01- Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	persen	51,00	51,32	2.232.030,05	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.01 KP: Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KEK Arun Lhokseumawe	01- Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	triliun Rupiah	0,56	1,51	2.800,00	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.02 KP: Pengembangan KEK Sei Mangkei	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI/KEK Sei Mangkei	01- Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	triliun Rupiah	5,61	7,23	2.159.493,35	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.02.03 KP: Pengembangan KEK Galang Batang	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI/KEK Galang Batang	01- Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	triliun rupiah	4,5	13,70	2.560,00	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.05 KP: Pengembangan KEK Gresik	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI/KEK JIIPE Gresik	01- Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	triliun Rupiah	26,5	21,68	-	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.06 KP: Pengembangan KI Bintang Inti Industrial Estate	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Bintang Inti Industrial Estate	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintang Inti Industrial Estate	triliun Rupiah	1,65	1,81	2.000,00	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.07 KP: Pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	triliun Rupiah	5,99	5,99	747,50	019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.02.08 KP: Pengembangan KIT Wilmar	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KIT Wilmar	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Wilmar	triliun Rupiah	13,02	13,27	-	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.09 KP: Pengembangan KIT Batang	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KIT Batang	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Batang	triliun Rupiah	3,77	4,50	40.000,00	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.10 KP: Pembangunan KI Seafer	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Seafer	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer	triliun Rupiah	0,73	0,77	300,00	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.11 KP: Pembangunan KI iSentra @Lamongan	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI iSentra @Lamongan	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra @Lamongan	triliun Rupiah	1,18	1,56	24.129,21	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.12 KP: Pembangunan KI Ngawi	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Ngawi	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi	triliun Rupiah	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)	-	019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.02.13 KP: Pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)	triliun Rupiah	2,22	2,40		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.14 KP: Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	triliun Rupiah	2,24	6,35		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.15 KP: Pembangunan KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	triliun Rupiah	1,05	1,05		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.16 KP: Pengembangan KI Konawe	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Konawe	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe	triliun Rupiah	305,94	306,24		019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.02.17 KP: Pengembangan KI Stardust	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Stardust	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust	triliun Rupiah	0,33	0,64		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.18 KP: Pembangunan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	triliun Rupiah	6,99	11,33		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.19 KP: Pengembangan KI Morowali	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Morowali	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali	triliun Rupiah	466,71	468,21		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.20 KP: Pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Sumbawa Barat	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat	triliun Rupiah	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)		019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.02.21 KP: Pengembangan KI Pulau Obi	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Pulau Obi	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi	triliun Rupiah	0,01	5,04		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.22 KP: Pengembangan KI Weda Bay	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Weda Bay	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay	triliun Rupiah	346,33	352,65		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.23 KP: Pembangunan KI Buli	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Buli	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli	triliun Rupiah	0,01	0,40		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.24 KP: Pembangunan KI Fakfak	01 - Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Fakfak	01- Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak	triliun Rupiah	(tahap persiapan)	(tahap persiapan)		019 - Kementerian Perindustrian
05.02.25 KP: Pembangunan KI Takalar	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Takalar	01- Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Takalar	triliun rupiah	(tahap persiapan)	0,24		019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	01 - Menguatnya kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	01- Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	persen	8,79 (2022)	8,09	9.367.548,15	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02- Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	hari	1,8	1,6		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.03.01 KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik	01 - Menguatnya Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik	01- Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Darat Selain Angkutan Rel terhadap PDB	persen	2,66	2,45	8.758.889,23	022 - Kementerian Perhubungan
		02- Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Laut terhadap PDB	persen	1,02	0,94		022 - Kementerian Perhubungan
		03- Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Udara terhadap PDB	persen	0,89	0,82		022 - Kementerian Perhubungan
		04- Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Rel terhadap PDB	persen	0,04	0,03		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap PDB	persen	0,10	0,09		022 - Kementerian Perhubungan
		06- Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi Standar	lokasi (kumulatif)	6	8		022 - Kementerian Perhubungan
		07- Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas	box/ship/jam	21 (2023)	36		022 - Kementerian Perhubungan
		08- Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya	lokasi	16	13		022 - Kementerian Perhubungan
		09- Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama	juta ton	1.391	1.447		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.03.02 KP: Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik	01 - Menguatnya integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik serta dan digitalisasi pada layanan logistik	01- Waktu Penahanan ( <i>dwell time</i> ) di Pelabuhan Selama Fase Impor	hari	2,85	2,85-2,79	1.287,48	015 - Kementerian Keuangan
05.03.03 KP: Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	01 - Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik Dalam Negeri	01- Indeks Peningkatan SDM Transportasi		110,10	86	607.371,44	022 - Kementerian Perhubungan
		02- Pertumbuhan Sektor Pos Logistik	persen	9,16	10		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	01 - Meningkatnya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global	01- Nilai PMA dan PMDN (Rp.Triliun)	triliun Rupiah	1.714,2	2.041,31- 2.125,15	279.232,42	065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.01 KP: Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai	01 - Meningkatnya Investasi Swasta Prioritas sebagai	01- Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder	triliun Rupiah	721,3-721,27	887,97-977,90	163.023,42	065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Pendorong Transformasi Ekonomi	Pendorong Transformasi Ekonomi	02- Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	(persen total nilai PMA/PMDN)	47,5-47,49	48,26-48,60		065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		03- Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan	triliun Rupiah	378,2	317,24-338,44		065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04- Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	triliun Rupiah	407,8	540,76-569,13		065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.02 KP: Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya Investasi yang berorientasi Ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global	01- Nilai PMA Berorientasi Ekspor	triliun Rupiah	164,6	176,10-190,01	109.492,39	065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		02- Nilai PMDN Berorientasi Ekspor	triliun Rupiah	56,2	62,99-67,90		065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.04.03 KP: Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik	01 - Meningkatnya Investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik	01- Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa	persen	52,2	52,14-52,37	6.716,61	065 - Kementerian Investasi dan Hilirasasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya perdagangan domestik, antarwilayah, dan Ekspor Barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi Ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01- Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia	persen	1,11 (2023)	1,18	414.905,53	090 - Kementerian Perdagangan
		02- Nilai Ekspor Jasa Indonesia	miliar USD	23,10 (2022)	32,62		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	persen	0,81 (2022)	1,05		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Nilai Total Pembelian Perdagangan Antarwilayah	triliun Rupiah	1.622 (2022)	2.133		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.05.01 KP: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	01 - Meningkatnya nilai pembelian perdagangan antar wilayah per pulau	01- Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Sumatera	triliun Rupiah	205 (2022)	233	61.769,48	090 - Kementerian Perdagangan
		02- Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Jawa	triliun Rupiah	1.059 (2022)	1.395		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Bali-Nusra	triliun Rupiah	51 (2022)	108		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Kalimantan	triliun Rupiah	121 (2022)	173		090 - Kementerian Perdagangan
		05- Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Sulawesi	triliun Rupiah	135 (2022)	165		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		06- Nilai Pembelian Perdagangan Antarwilayah di Pulau Papua-Maluku	triliun Rupiah	51 (2022)	59		090 - Kementerian Perdagangan
	02 - Meningkatnya kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per pulau	01- Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera	persen	11,63 (2022)	12,27		090 - Kementerian Perdagangan
		02- Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa	persen	12,48 (2022)	13,59		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra	persen	9,23 (2022)	10,36		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan	persen	10,12 (2022)	10,84		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05- Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi	persen	10,78 (2022)	12,42		090 - Kementerian Perdagangan
		06- Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku	persen	10,63 (2022)	12,43		090 - Kementerian Perdagangan
	03 - Meningkatnya nilai Ekspor Barang per pulau	01- Nilai Ekspor Barang di Pulau Sumatera	triliun Rupiah	1.073	1.511		090 - Kementerian Perdagangan
		02- Nilai Ekspor Barang di Pulau Jawa	triliun Rupiah	1.616	2.176		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Nilai Ekspor Barang di Pulau Bali-Nusra	triliun Rupiah	52	86		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Nilai Ekspor Barang di Pulau Kalimantan	triliun Rupiah	728	1.401		090 - Kementerian Perdagangan
		05- Nilai Ekspor Barang di Pulau Sulawesi	triliun Rupiah	458	630		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		06- Nilai Ekspor Barang di Pulau Papua-Maluku	triliun Rupiah	322	365		090 - Kementerian Perdagangan
	04 - Meningkatnya diversifikasi Ekspor per pulau	01- Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sumatera		0,42 (2022)	0,28		090 - Kementerian Perdagangan
		02- Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Jawa		0,09 (2022)	0,05		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Bali- Nusra		0,37 (2022)	0,24		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Kalimantan		0,60 (2022)	0,41		090 - Kementerian Perdagangan
		05- Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sulawesi		0,53 (2022)	0,36		090 - Kementerian Perdagangan
		06- Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Papua- Maluku		0,74 (2022)	0,58		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	05 - Meningkatnya jumlah usaha e-commerce per pulau	01- Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Sumatera	unit kumulatif	330.700 (2022)	547.700		090 - Kementerian Perdagangan
		02- Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Jawa	unit kumulatif	2.288.300 (2022)	3.789.900		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra	unit kumulatif	125.300 (2022)	207.600		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Kalimantan	unit kumulatif	132.000 (2022)	218.700		090 - Kementerian Perdagangan
		05- Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Sulawesi	unit kumulatif	109.700 (2022)	181.700		090 - Kementerian Perdagangan
		06- Jumlah Usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku	unit kumulatif	10.100 (2022)	16.700		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	06 - Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	01- Koefisien Variasi (Coefficient of Variation) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antarwaktu dan Antarwilayah	persen	(indikator baru)	17,5-22,5		125 - Badan Pangan Nasional
05.05.02 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa Ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi di pasar global	01- Kontribusi Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi Indonesia terhadap Total Ekspor Produk Indonesia	persen	42,75	25,52	108.292,99	090 - Kementerian Perdagangan
		02- Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi terhadap Dunia	persen	0,62 (2023)	0,78		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Nilai Ekspor Barang-Barang Berkategori Hijau (Environmental Goods)	miliar USD	26,15	21,49		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04- Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	persen	12,21	12,92		019 - Kementerian Perindustrian
05.05.03 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa Ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi	01- Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi terhadap Dunia	persen	1,35 (2022)	1,48	16.399,93	090 - Kementerian Perdagangan
		02- Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor	pelaku usaha (kumulatif)	20.533 (2022)	23.047		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Persentase Usaha e-commerce yang Melakukan Ekspor	persen	0,85 (2022)	1,14		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.04 KP: Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	01 - Meningkatnya pangsa Ekspor produk pertanian, perikanan dan industri berbasis SDA di pasar global	01- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	miliar USD	5,63 (2023)	6,70	23.866,78	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02- Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Pertanian terhadap Dunia	persen	2,96 (2022)	3,45		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam terhadap Dunia	persen	2,38 (2022)	2,70		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah		0,294 (2023)	0,282		019 - Kementerian Perindustrian
		05- Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	produk	179 (2022)	209		019 - Kementerian Perindustrian
		06- Nilai Ekspor Rumput Laut	juta USD	433,72 (2023)	647,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		07- Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut	persen	34,31	49,9		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
05.05.05 KP: Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya Ekspor jasa dan produk kreatif	01- Nilai Ekspor Jasa Telekomunikasi, Komputer, dan Informasi	miliar USD	3,74	3,12	14.724,71	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Nilai Ekspor Jasa bisnis lainnya	miliar USD	8,74	8,88		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif	miliar USD	25,10	27,85		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		04- Nilai Perdagangan Komoditas Digital	miliar USD	6,34	11,71		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.06 KP: Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV)	01 - Meningkatnya partisipasi sektor elektronik Indonesia dalam rantai nilai regional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dan sektor otomotif Indonesia termasuk Electric Vehicle (EV) dalam rantai nilai global	01- Tingkat Partisipasi Produk Elektronik Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	persen	42,00 (2022)	51,00	13.936,55	019 - Kementerian Perindustrian
		02- Tingkat Partisipasi Produk Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	persen	23,00 (2022)	25,00		019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
05.05.07 KP: Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya pemanfaatan atau utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01- Nilai Ekspor Barang ke Negara-negara yang Tergabung dalam RCEP	miliar USD	172,8 (2023)	200,6	17.420,03	090 - Kementerian Perdagangan
		02- Nilai Ekspor Barang ke Negara-negara yang Tergabung dalam ASEAN	miliar USD	53,1 (2023)	61,6		090 - Kementerian Perdagangan
		03- Nilai Ekspor Barang ke Negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA	miliar USD	2,8 (2023)	3,2		090 - Kementerian Perdagangan
		04- Nilai Ekspor Barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA	miliar USD	3,2 (2023)	3,7		090 - Kementerian Perdagangan
		05- Nilai Ekspor Barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA	miliar USD	20,8 (2023)	24,1		090 - Kementerian Perdagangan
		06- Nilai Ekspor Barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA	miliar USD	2,6 (2023)	3,1		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		07- Nilai Ekspor Barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA	miliar USD	10,3 (2023)	12,0		090 - Kementerian Perdagangan
		08- Nilai Ekspor Barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA	miliar USD	0,31 (2023)	0,36		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.08 KP: Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	01 - Meningkatnya Daya Saing Produk Indonesia Terstandarisasi	01- Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI	persen	3,109 (2023)	3,7	158.495,07	084 - Badan Standardisasi Nasional
		02- Persentase Produk ber-SNI	persen	10	12,5		084 - Badan Standardisasi Nasional
	04 - Terciptanya Iklim Persaingan Usaha yang Sehat	01- Indeks Persaingan Usaha		4,87/7,00 (2022)	5,51/7,00		108 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha
	05 - Meningkatnya Keberdayaan Konsumen	01- Indeks Keberdayaan Konsumen		53,23 (2022)	66		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
06 PN: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01 - Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	01- Proporsi penduduk kelas menengah	persen	17,13	18,20	192.226.221,51	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02- Tingkat Kemiskinan	persen	8,57	6,5-7,5		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03- Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	1,26	0-0,5		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		04- Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	persen	9,07 (2023)	10,40		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01- Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	persen	65,25	68,66		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	03 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01- Persentase Desa Mandiri	persen	22,85	23,91		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	04 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	01- Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	persen	56,56 (2022)	57,70		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
06.01 PP: Penguatan Perencanaan Berbasis Bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	01 - Terselenggaranya perencanaan berbasis bukti dengan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	02- Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	persen	0	20	116.974,30	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
06.01.01 KP: Tata Kelola Perencanaan Berbasis Bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	01 - Tersedianya tata kelola perencanaan berbasis bukti dengan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	02- Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	persen	0	20	55.543,25	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
06.01.02 KP: Pemanfaatan Data Terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	01 - Terselenggaranya pemanfaatan data terintegrasi yang optimal untuk perencanaan pembangunan nasional (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	02- Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	persen	0	20	61.431,04	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	01 - Terwujudnya integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif dalam menghadapi bencana alam, bencana	01- Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	persen	64,75 (2023)	73	166.424.005,95	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	31,21	34,99		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	sosial, serta dampak perubahan iklim	03- Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	keluarga/tahun	0	1,5 juta		027 - Kementerian Sosial
06.02.01 KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	01 - Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	01- Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	63	70	165.677.652,39	027 - Kementerian Sosial
		02- Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	persen	7,5	10		027 - Kementerian Sosial
		03- Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	keluarga/tahun	10 ribu	700 ribu		027 - Kementerian Sosial
06.02.02 KP: Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terlaksananya reformasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	01- Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	13,05	17,63	32.928,00	026 - Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	53,44	56,10		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03- Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif	rekomendasi kebijakan	3 (2023)	3		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06.02.03 KP: Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy)	01 - Meluasnya pemberian layanan keperawatan	01- Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	persen	25	30	713.425,56	027 - Kementerian Sosial
		02- Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi	persen	37	42		027 - Kementerian Sosial
06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan	01 - Terciptanya lapangan kerja dari peningkatan wirausaha	01- Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	persen	73,8	74,6	1.748.142,19	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	yang inovatif dan berkelanjutan	02- Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	persen	4,96	46,98		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	01 - Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	01- Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap	persen	3,9 (2023)	4,20	512.323,58	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
06.03.02 KP: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	01 - Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif	01- Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	jiwa/tahun	0	1.500.000	690.243,19	027 - Kementerian Sosial
06.03.03 KP: Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian	01- Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan 02- Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria	persen persen	46,16 46,64	41 43	230.799,67	056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria	03- Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan		0,0057	0,0034		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
06.03.04 KP: Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	01 - Meningkatnya Peran Koperasi dalam Penumbuhan Ekonomi Lokal	01- Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	persen	0	11,5	314.775,75	149 - Kementerian Koperasi
		02- Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	persen	0	70,0		149 - Kementerian Koperasi
06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	01- Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	persen	44,13 (2022)	44,58	4.242.404,58	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan		44,61 (2023)	45,01		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya Peran Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan sebagai Pusat	01- Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	persen	6,97 (2022)	7,64		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	02- Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan		48,36 (2023)	48,96		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.01 KP: Pembangunan Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	01- Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	persen	40,75 (2022)	41,14	4.149.152,21	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI		45,86 (2023)	46,46		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	01- Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	persen	3,38 (2022)	3,44		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI		42,74 (2023)	43,34		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.02 KP: Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya Peran Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat	01- Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	persen	3,83 (2022)	3,92	93.252,38	145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	02- Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI		49,81 (2023)	50,41		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatkan Peran Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	01- Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	persen	3,15 (2022)	3,72		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI		47,20 (2023)	47,80		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	01 - Mengembangkan kota berkelanjutan di dunia	01- Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara		47,79	48,79	5.520.452,48	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan	01- Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan	persen	5,4	6,7		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	03 - Mewujudkan simbol identitas nasional	01- Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara		61,35	64,35		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
06.05.01 KP: Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	01 - Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	01- Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	hektar	715,32	850-1000	5.487.719,64	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02- Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara	persen	0	50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03- Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	persen	0	60		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04- Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	23	60		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		05- Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara		0,65	0,76		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	01- Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	orang	0	1.700-4.100		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02- Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	0	44		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.05.02 KP: Pembangunan Sosial, Superhub Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan Ibu Kota Nusantara	01 - Terwujudnya pengembangan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar	01- Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Ibu Kota Nusantara	persen	1,58	2,24	32.732,84	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02- Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara	triliun Rupiah	58,41	70		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03- Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan	klaster	1	2		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Terwujudnya pembangunan sosial dan sumberdaya manusia di Ibu Kota Nusantara	01- Persentase Masyarakat Sejahtera	persen	8,91	10,00		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02- Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara	persen	55	69		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
		03- Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	persen	65	74		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	03 - Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara	01- Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara	persen	17	19		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara		70,72	71,78		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03- Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara		104,00	94,90		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04- Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	hektare	0	150		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	01 - Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01- Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi	unit/tahun	769.078	2.140.288	725.516,13	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
06.06.01 KP: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	01 - Meningkatnya Penyediaan Hunian Baru atau Peningkatan Kualitas yang Terintegrasi dengan PSU	01- Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun (unit)	unit/tahun	2.830	476	624.567,69	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02- Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya (unit)	unit/tahun	130.394	21.500		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		03- Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (unit)	unit/tahun	21.159	1.173		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.02 KP: Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu	01 - Meningkatnya Perumahan Publik Vertikal yang Disediakan Secara Terpadu	01- Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa) (unit)	unit/tahun	3.930	358	64.309,02	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02- Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal	unit/tahun	0	5.000		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
06.06.03 KP: Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01 - Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan Kemudahan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01- Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan (rumah tangga)	rumah tangga/tahun	477.733	315.000	2.500,00	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Perumahan	01 - Terciptanya ekosistem perumahan yang mendukung tersedianya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01- Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	kabupaten/kota	514	514	13.125,00	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekomendasi kebijakan	1	1		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.05 KP: Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu	01 - Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	01- Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu (Ha)	hektare/tahun	2,86	11	21.014,42	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	01 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01- Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI	persen	KTI: 7,42; KBI: 15,42	KTI: 7,89; KBI: 16,02	13.448.725,89	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	01 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	01- Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman	persen	18,9 (2023)	24	1.344.063,99	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02- Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman	persen	4,77 (2023)	7		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03- Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	persen	25,99	26,26		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		04- Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24,62	25,01		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.07.02 KP: Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Desa	01 - Meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui transformasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa	01- Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes	persen	3,97	4,07	475.215,70	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		02 - Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal	01- Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing	kawasan	3		5



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
	03 - Memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa	01- Persentase Desa Berketahanan Iklim	persen	33,73	35,73		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
06.07.03 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif	01 - Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif	01- Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital	persen	74 (2022)	78	1.395.415,16	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		02- Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	desa	(indikator baru)	800		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03- Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	desa	(indikator baru)	1.620		010 - Kementerian Dalam Negeri
06.07.04 KP: Pembangunan Daerah Tertinggal	01 - Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat pada Daerah Tertinggal	01- Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkatkan Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju	persen	(indikator baru)	23,33	6.125.705,01	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
06.07.05 KP: Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	01 - Menjadi beranda terdepan negara dengan meningkatkan intergrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah	01- Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas	persen	21,46	18,29	2.186.912,61	111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		02- Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	persen	44,38	46,29		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		03- Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan		0,52	0,60		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		04- Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas		0,64	0,71		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
06.07.06 KP: Transformasi	01 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi	01- Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	52,88	58,10	311.713,21	152 - Kementerian Transmigrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	pusat pertumbuhan lokal	02- Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		0,425	0,475		152 - Kementerian Transmigrasi
		03- Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	0,90	1,20		152 - Kementerian Transmigrasi
		04- Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pem erintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	37,5	45		152 - Kementerian Transmigrasi
06.07.07 KP: Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan	01 - Meningkatnya kapasitas pendamping pembangunan	01- Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan	kementerian/ lembaga	4	5	1.609.700,23	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

**PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN**

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07 PN: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	01 - Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,68 (2023)	0,70	20.852.950,69	130 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan
		02 - Indeks Persepsi Korupsi		37,00	40,00		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		03 - Indeks Integritas Partai Politik		62,83	65,00 - 66,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	02 - Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional		75,69	72,80		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		93,0	94,0		011 - Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	03 - Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba	01 - Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	poin	1,73	1,70		066 - Badan Narkotika Nasional
	04 - Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	01 - Return on Asset (ROA) BUMN	persen	3,14 (2023)	3,26		041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	05 - Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui Optimalisasi Belanja Negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	01 - Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	persen	12,88	11,71 - 12,31		015 - Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	06 - Tercapainya Tingkat inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	01 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,5±1,0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	01 - Terwujudnya Partai Politik yang Modern, Mandiri, dan Fungsional	01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi		64,98	67,00 - 68,99	598.701,42	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan		61,42	64,00 - 65,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		03 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik		61,85	64,00 - 65,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		04 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal		61,11	64,00 - 65,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		05 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen		67,47	70,00 - 71,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	02 - Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas	01 - Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		61,72	67,98		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	03 - Terwujudnya Penguatan Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pelayanan Publik yang didukung data kependudukan yang akurat	01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	daerah	0	275		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.01 KP: Penguatan Tata Kelola Partai Politik dan Pendidikan Politik	01 - Terwujudnya Kelembagaan Partai Politik yang Berbasis Nilai serta Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel	01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri	persen	100 (2023)	100	141.439,13	010 - Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02 - Persentase parpol penerima bantuan Keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan Keuangan parpol untuk pendidikan politik	persen	100	60		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.02 KP: Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	01 - Terselenggaranya Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	01 - Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	persen	6,53	20	179.718,85	010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.03 KP: Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	01 - Terwujudnya Sistem Pemilu yang Transformatif	01 - Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	persen	(indikator baru)	73	230.703,44	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu		76,96	0 (tidak dihitung)		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
07.01.04 KP: Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu	01 - Terwujudnya Sistem Pemilu yang Inklusif dan Partisipatif	01 - Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif	persen	(indikator baru)	96	46.840,00	076 - Komisi Pemilihan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02 - Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	persen	(indikator baru)	85		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
07.02 PP: Reformasi Hukum	01 - Terwujudnya Regulasi yang Adaptif dan Taat Azas, Akses Keadilan yang Merata, serta Masyarakat yang Patut Hukum	01 - Indeks Materi Hukum 02 - Indeks Budaya Hukum		0,60 (2023) 0,81 (2023)	0,52 0,84	350.218,88	135 - Kementerian Hukum 135 - Kementerian Hukum
07.02.01 KP: Mendirikan Pusat Legislasi Nasional	01 - Terwujudnya Sistem Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas	01 - Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,70	3,27	5.784,37	135 - Kementerian Hukum
07.02.02 KP: Transformasi Akses Terhadap Keadilan	01 - Terwujudnya Layanan Akses terhadap Keadilan yang Substansial terutama dan Tidak Terbatas bagi Kelompok Rentan	01 - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban 02 - Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	persen	0 84,40 (2023)	83,00 89,20	188.311,61	123 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 135 - Kementerian Hukum
07.02.03 KP: Penguatan Budaya Hukum	01 - Terwujudnya Program literasi Hukum dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang Inklusif	01 - Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat 02 - Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum		0,67 (2023) 0,95 (2023)	0,73 0,95	65.211,21	135 - Kementerian Hukum 135 - Kementerian Hukum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.02.04 KP: Pembangunan Hukum Sektor Strategis	01 - Memperkuat Pembangunan Sektor Strategis yang Berlandaskan Hukum	01 - Persentase penyelesaian Kasus pertanahan	persen	57,63 (Mei 2025)	52,50	90.911,69	056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya Lembaga dan Penegakan Hukum yang Berintegritas, Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Indeks Kelembagaan Hukum		0,73 (2023)	0,77	165.444,11	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Penegakan Hukum		0,64 (2023)	0,74		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.03.01 KP: Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Terwujudnya Lembaga penegak Hukum yang Berintegritas, Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum		0,73 (2023)	0,70	104.398,75	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.03.02 KP: Penerapan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya penegakan Hukum yang Adil, Tidak Tebang-Pilih, Transparan, Berintegritas, dan Profesional	01 - Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum	persen	56,70 (2023)	56,70	61.045,36	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata	persen	54,00	40,00		005 - Mahkamah Agung



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal	01 - Terwujudnya Efektivitas dan Integrasi Kebijakan Bidang Penuntutan di Kejaksaan RI dan Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara	01 - Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara	persen	0	63,00	1.493.899,81	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM Kejaksaan	persen	0	65,00		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.01 KP: Penguatan Kelembagaan Kejaksaan	01 - Terwujudnya Sistem Penuntutan yang Integratif	01 - Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai	persen	0	63,00	1.418.335,74	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.02 KP: Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa	01 - Terwujudnya Kualitas dan Kuantitas Jaksa yang Proporsional	01 - Tingkat Kecukupan Personil Jaksa	persen	98,02	98,50	75.564,07	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa	persen	10,65	70,00		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		03 - Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa	persen	77,60	82,00		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta	01 - Terwujudnya Sistem Antikorupsi dan Anti Pencucian Uang yang Efektif serta Sistematis	01 - Indeks Integritas Nasional		71,53	74,52	94.015,62	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		02 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		3,85	3,99		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)		03 - Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang		5,37 (2022)	5,60		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.05.01 KP: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	01 - Terwujudnya Pelebagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis	01 - Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)		72,34	-	26.358,25	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.02 KP: Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi	01 - Terciptanya Peningkatan Kesadaran Antikorupsi	01 - Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi)		3,76	3,86	33.217,75	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.03 KP: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	01 - Terwujudnya Strategi Pencegahan Korupsi di Sektor Pemerintah dan Masyarakat	01 - Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)		86,44	89,17	16.533,15	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.05.04 KP: Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	01 - Terwujudnya Strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang Terintegrasi, Modern, dan Berorientasi pada Pengejaran Aset Tindak Pidana	01 - Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU	persen	75,00	85,00	17.906,47	078 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
07.06 PP: Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	01 - Terciptanya Upaya Holistik dan Terintegratif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan Baik di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota	01 - Indeks P4GN		63,60 (2023)	64,50	4.298,88	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.01 KP: Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup Sehat, Terutama Dimulai Dari Keluarga dan Sekolah	01 - Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	01 - Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika		(indikator baru)	59,50	1.200,00	066 - Badan Narkotika Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.06.02 KP: Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi dalam Rangka Meningkatkan Kepulihan Penyalahguna Narkotika	01 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi		3,63 (2023)	3,61	0	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.03 KP: Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa	01 - Terciptanya Generasi Penerus Bangsa yang Bebas dari Ancaman Perilaku Negatif yang Bisa menghambat Potensinya	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja		53,50	61,00		066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.04 KP: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba	01 - Terlaksananya Penanganan Tindak Pidana Narkotika yang sesuai dengan UU yang Berlaku	01 - Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika	persen	(indikator baru)	91,00	2.287,38	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.06 KP: Meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Intelijen P4GN	01 - Meningkatnya Kemampuan Deteksi Dini dan Pemetaan terhadap Potensi Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika	01 - Persentase Jumlah Provinsi yang Memiliki Kemampuan Intelijen Minimal	persen	(indikator baru)	8,00	811,50	066 - Badan Narkotika Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.06.07 KP: Optimalisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	perkara	20	30	0	066 - Badan Narkotika Nasional
07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya Penyelenggaraan Manajemen ASN sesuai dengan Prinsip Meritokrasi	01 - Indeks Sistem Merit ASN		0,54	0,62	518.343,73	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	01 - Terwujudnya kesejahteraan ASN yang Adil, Layak dan Kompetitif	01 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	(indikator baru)	20,00	2.220,00	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.02 KP: Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN	01 - Terwujudnya Sistem Manajemen Talenta ASN sesuai dengan Prinsip Meritokrasi	01 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00	3.400,00	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		04 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standar Kompetensi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		05 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.07.03 KP: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar	01 - Terwujudnya penerapan pengembangan Kompetensi ASN yang Berkualitas	01 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00	464.501,14	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.04 KP: Digitalisasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang Berkualitas	01 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00	43.200,00	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.05 KP: Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN	01 - Terbangunnya Perilaku ASN yang Beretika	01 - Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal "Menengah"	persen	0	20,00	3.022,59	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.06 KP: Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penerapan dan Evaluasi Manajemen ASN yang Berkualitas	01 - Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit Minimal "Menengah"	persen	0	20,00	2.000,00	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	01 - Indeks Pelayanan Publik		4,02	3,48	419.940,87	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional		71	71		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.08.01 KP: Tata Kelola Pelayanan Publik	02 - Terwujudnya Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik	01 - Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi	persen	57,41	41,44	46.532,89	110 - Ombudsman Republik Indonesia
	01 - Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	01 - Indeks Pelayanan Publik K/L		4,39	3,76		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi		3,97	3,44		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Indeks Pelayanan Publik Kabupaten		3,67	3,31		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		04 - Indeks Pelayanan Publik Kota		4,05	3,70		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.08.02 KP: Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya Kinerja Pembangunan yang Akuntabel dan Berintegritas	01 - Persentase Instansi Pemerintah (K/L) dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori "B" ke atas)	persen	100	100	46.407,97	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Persentase Instansi Pemerintah (Provinsi) dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori "B" ke atas)	persen	100	100		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Persentase Instansi Pemerintah (Kab/Kota) dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori "B" ke atas)	persen	85,24	86,00		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		04 - Nilai Kinerja Pengadaan		0	51,61		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		05 - Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan		0	63,39		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		06 - Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik	persen	66,30	72,00		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		07 - Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	persen	0	67,00		054 - Badan Pusat Statistik
		08 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,35	2,45		054 - Badan Pusat Statistik
		09 - Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang Baik	persen	23,73	40		086 - Lembaga Administrasi Negara
07.08.03 KP: Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional	01 - Terwujudnya Sinergi Pengendalian dan Pengawasan	01 - Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi*	persen	0	51,46	327.000,00	089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
	Program Pembangunan Nasional	02 - Persentase Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi*	persen	0	44,74		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		03 - Persentase Kab/Kotadengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi*	persen	0	17,72		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		04 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	predikat	0	optimal (61-90)		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		05 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	persen	0	35,00		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	01 - Terwujudnya Harmonisasi Pembagian Kewenangan Antar	01 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		53,95	72,00	413.465,02	010 - Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
	Tingkat Pemerintahan dengan Memperhatikan Tipologi Kewilayahan serta Penguatan Fondasi Keuangan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah daerah	02 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		87,90	89,00		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio)	persen PDRB	1,13 (data realisasi APBD 2024 <i>unaudited</i> )	1,30		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.01 KP: Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah	01 - Terwujudnya Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah yang Optimal	01 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berkategori Sangat Baik	provinsi	4	15	188.031,88	010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.02 KP: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah	01 - Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan Memperhatikan Tipologi Kewilayahan	01 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berkategori Tuntas Paripurna	provinsi	6	15	195.353,14	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Kabupaten/Kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya Berkategori Tuntas Madya	kabupaten/kota	420	203		010 - Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2026	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU
		03 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) Berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)	daerah (prov/kab/kota)	112	98		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.03 KP: Penguatan Fondasi Keuangan Daerah	01 - Terwujudnya Keuangan Daerah dengan Pendapatan Daerah yang Optimal, Belanja Daerah yang Berkualitas, dan Pemanfaatan Pendanaan Alternatif yang Meningkat	01 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	360	30.080,00	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	360		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	persen	6,81	6,15		015 - Kementerian Keuangan
		04 - Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	provinsi	4	29		010 - Kementerian Dalam Negeri
		05 - Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif	daerah (prov/kab/kota)	7	4		010 - Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.10 PP: Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Digitalisasi yang Transparan, Inklusif dan Efisien	01 - Indeks Pemerintah Digital		3,12	1,70	2.605.320,17	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.01 KP: Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Transformatif	01 - Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang Ditetapkan	kebijakan	0	2	16.075,90	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Jumlah Lembaga yang Menerapkan Arsitektur Pemerintah Digital	lembaga	0	62		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.02 KP: Penguatan Teknologi Pemerintah Digital	01 - Tersedianya Teknologi Pemerintah Digital yang Berkualitas dan tangguh	01 - Persentasi Instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	persen	(indikator baru)	92,00	26.839,42	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Persentase K/L/D yang Mengimplementasikan SPLP	persen	(indikator baru)	7,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
07.10.03 KP: Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN	01 - Terwujudnya ASN yang Berkompetensi dan Berbudaya Digital dalam Pelaksanaan Pemerintah Digital	01 - Persentase ASN dengan Kompetensi Digital Optimal	persen	0	60,00	2.038,25	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	01 - Terselenggaranya Layanan Digital Pemerintah yang Berkualitas dan Terpadu	01 - Jumlah Layanan Publik Prioritas yang Terintegrasi dalam Portal Pelayanan Publik	layanan	0	20	888.413,05	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.05 KP: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah	01 - Tersedianya Data Pemerintah yang Dapat Dimanfaatkan untuk Interoperabilitas dan Lintas Instansi yang Mendukung Layanan Digital Nasional	01 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia		0	71-90	1.671.953,55	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase Cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia	persen	0	28,90		083 - Badan Informasi Geospasial
		03 - Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul	persen	0	7,42		083 - Badan Informasi Geospasial
		04 - Persentase IGT yang Termanfaatkan	persen	0	29,80		083 - Badan Informasi Geospasial
07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	01 - Meningkatnya Produktivitas BUMN	01 - Profit Margin Ratio (PMR) BUMN	persen	11,15 (2023)	10,63	6.064,54	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.11.01 KP: Peningkatan Daya Saing BUMN	01 - Meningkatnya Daya Saing BUMN	01 - Total Asset Turnover BUMN	kali (x)	0,282 (2023)	0,306	3.064,54	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.02 KP: Peningkatan Efisiensi Peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah	01 - Meningkatnya Efisiensi Peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah	01 - Peringkat Risiko Komposit BUMN Minimal 3	persen	(indikator baru)	65,20	3.000,00	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	01 - Tercapainya Peningkatan Penerimaan Perpajakan yang Optimal sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi	01 - Rasio Perpajakan terhadap PDB	persen PDB	10,08	10,08 - 11,54	2.520,40	015 - Kementerian Keuangan
	02 - Terwujudnya Peningkatan PNBPN yang Optimal dan Tidak Bergantung pada SDA	01 - Rasio PNBPN (persen PDB)	persen PDB	2,64 ( <i>unaudited</i> 2024)	1,63 - 1,76		015 - Kementerian Keuangan
07.12.01 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	01 - Tercapainya Peningkatan Basis Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	01 - Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi Berdasarkan Target Kinerja Organisasi	persen	90	90		015 - Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02 - Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan	persen	100	100		015 - Kementerian Keuangan
		03 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara		100,00	100,00		015 - Kementerian Keuangan
07.12.02 KP: Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	01 - Terciptanya Dukungan PNPB yang Optimal	01 - Rasio Capaian PNPB terhadap Target yang Ditetapkan (persen)	persen	117,8	90-100	0	015 - Kementerian Keuangan
07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	01 - Terwujudnya Dukungan Belanja Negara yang Optimal untuk Mendorong Produktifitas dan Mencapai Tujuan Pembangunan	01 - Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara		86,00	86,50	0	015 - Kementerian Keuangan
07.13.01 KP: Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat	01 - Meningkatnya Alokasi Belanja Negara yang Produktif	01 - Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah		84,00	85,50		015 - Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.13.02 KP: Optimalisasi Kualitas Belanja TKD	01 - Meningkatnya Kualitas Belanja TKD untuk Mendukung transformasi ekonomi	01 - Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	persen	100,00	100,00		015 - Kementerian Keuangan
		02 - Alokasi TKD untuk Infrastruktur	triliun	70,4	55,6		015 - Kementerian Keuangan
		03 - Persentase Kinerja Hibah Daerah	persen	75,00	75,00		015 - Kementerian Keuangan
07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	01 - Terwujudnya Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan untuk Mendukung Kebijakan Fiskal yang Ekspansif, Terarah, dan Terukur dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi	01 - Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman	persen PDB	2,29	2,48-2,53	8.500,00	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang Menjamin Keberlanjutan Fiskal	persen PDB	39,81	39,69-39,85		015 - Kementerian Keuangan
07.14.01 KP: Optimalisasi Sumber- Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Kestinambungan Fiskal	01 - Terciptanya Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan yang Berkelanjutan	01 - Imbal Hasil (Yield) SBN	persen	7,00	6,60-7,20	0,00	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara	persen	100,00	100,00		015 - Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.14.02 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pembiayaan Non Utang yang Inovatif	01 - Meningkatnya Pemanfaatan Skema Pendanaan Inovatif	01 - Jumlah Sistem Informasi Terintegrasi yang Dikembangkan	sistem informasi	1	1	8.500,00	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
07.15 PP: Pengendalian Inflasi	01 - Terkendalinya Tingkat inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi	01 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,50±1,00	13.861.008,28	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.15.01 KP: Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	01 - Terjaganya Komponen Inflasi Harga Bergejolak	01 - Inflasi Harga Bergejolak	persen	0,12	3,00-5,00		125 - Badan Pangan Nasional
07.16 PP: Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	01 - Terwujudnya pelindungan WNI, termasuk Pekerja Migran Indonesia	01 - Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri	persen	85,00	87,50	311.208,96	011 - Kementerian Luar Negeri
07.16.01 KP: Penguatan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	01 - Meningkatnya Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	01 - Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	persen	46,97	65,00	51.230,14	104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
07.16.02 KP: Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif	01 - Terintegrasinya dan terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) , termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri		96,00	96,10	259.978,82	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri		97,50	98,10		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Indeks Diplomasi Perlindungan WNI di Luar Negeri		98,50	98,80		011 - Kementerian Luar Negeri

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

**PRIORITAS NASIONAL 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR**

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
08 PN: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	01 - Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	01- Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		62,85 (2021)	66,15	90.834.011,65	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	01- Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	persen	0,140 (2022)	0,136		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	01 - Terwujudnya Masyarakat yang Memiliki Cara Pandang dan Praktik Beragama Jalan Tengah dalam Kehidupan Beragama, serta Layanan Keagamaan yang Transformatif	01- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		76,47	77,14	2.246.237,95	025 - Kementerian Agama
		02- Indeks Layanan Keagamaan		86,51	87,51		025 - Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
08.01.01 KP: Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	01 - Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	01- Nilai Layanan Penyuluhan Agama		84,52 (2024)	84,74	126.505,92	025 - Kementerian Agama
		02- Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (Agama dan Etnis)		61,78 (2021)	66,99		025 - Kementerian Agama
		03- Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	persen	27	50		025 - Kementerian Agama
		04- Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga	persen	0,5 (2022)	0,8		025 - Kementerian Agama
08.01.02 KP: Jaminan Hak Beragama serta Kehidupan Beragama yang Harmonis dan Rukun	01 - Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis serta Rukun	01- Persentase Rekomendasi Early Warning System (Keagamaan) yang di Tindak Lanjuti	persen	10	40	7.534,22	025 - Kementerian Agama
		02- Persentase Provinsi yang Memperoleh Nilai Kerukunan Umat Beragama dengan Kategori Sangat Tinggi	persen	24	35		025 - Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
08.01.03 KP: Peningkatan Peran Tokoh Agama, Lembaga Agama, dan Lembaga Sosial Keagamaan	01 - Menguatnya Peran dan Kerja Sama Tokoh Agama dan Lembaga Agama/Sosial Keagamaan dalam Mewujudkan Layanan Keagamaan yang Inklusif	01- Persentase Lembaga Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan yang Memenuhi Standar Pengelolaan	persen	40	46	0	025 - Kementerian Agama
08.01.04 KP: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	01 - Tersedianya Sarpras Peribadatan yang Memenuhi Standar	01- Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar	persen	66,69	68,02		025 - Kementerian Agama
08.01.05 KP: Transformasi Layanan Keagamaan yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA)	01 - Meningkatnya Kualitas Layanan KUA secara Merata, Inklusif, dan Transformatif	01- Indeks Kepuasan Layanan KUA		85,53	85,75	663.644,53	025 - Kementerian Agama
08.01.06 KP: Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	01 - Meningkatnya Kualitas Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	01- Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan Haji dalam negeri; Layanan Haji luar negeri		90,45 (2022); 88,20	91,25; 88,75	964.714,36	025 - Kementerian Agama
		02- Persentase Nilai Pertumbuhan Perolehan Nilai Manfaat Dana Haji	persen	10,4	12,8		Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		03- Persentase Lembaga Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah yang Terakreditasi (A); Lembaga Penyelenggara Haji khusus; Lembaga Penyelenggara Umrah	persen	82,00; 96,000	82,10; 96,014		025 - Kementerian Agama
08.01.07 KP: Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang Profesional	01- Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal		88,56	91,69	483.838,92	142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
		02- Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal	persen	34,08	46,10		142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
08.01.08 KP: Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	01 - Meningkatnya Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat	01- Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan	persen	1	3	0	025 - Kementerian Agama
		02- Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang Akuntabel dan Profesional	persen	78	85		025 - Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	01 - Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berkebudayaan Maju	01- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		57,13 (2023)	58,99	1.212.884,59	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	01 - Terwujudnya Karakter dan Jati Diri Bangsa yang Kokoh Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	01- Persentase Penduduk yang Mengikuti Gotong Royong dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Lainnya	persen	36,00 (2023)	37,06	218.621,64	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.02 KP: Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	01 - Terwujudnya Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya yang Efektif dan Berkelanjutan	01- Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	persen	58	62	242.032,66	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	01 - Terwujudnya Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas SDM Kebudayaan	01- Persentase Penduduk yang Bekerja di Bidang Seni Budaya 02- Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Kumulatif)	persen kawasan	0,43 (2023) 1	0,51 3	282.461,91	140 - Kementerian Kebudayaan 140 - Kementerian Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
08.02.04 KP: Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	01 - Terpenuhinya Hak Berkebudayaan dan Kebebasan Berekspresi, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	01- Persentase Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni	persen	1,58	1,76	115.271,38	140 - Kementerian Kebudayaan
		02- Jumlah Wilayah Adat yang Dikembangkan dalam Pemajuan Kebudayaan	wilayah adat	3	4		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.05 KP: Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia	01 - Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia	01- Indeks Pembangunan Kebahasaan		45,82 (2022)	52,72	189.498,13	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
08.02.06 KP: Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan	01 - Terwujudnya Kearsipan yang Transformatif untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan	01- Indeks Budaya Tertib Arsip		70,24	73,86	85.000,00	087 - Arsip Nasional Republik Indonesia
		02- Indeks Memori Kolektif Bangsa		69,10	72,80		087 - Arsip Nasional Republik Indonesia
08.02.07 KP: Pengembangan Diplomasi Kebudayaan	01 - Meningkatnya Rekognisi Global atas Kebudayaan Indonesia	01- Jumlah Warisan Budaya Indonesia yang Diusulkan sebagai Warisan Budaya Dunia	unit	2	5	79.998,88	140 - Kementerian Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
		02- Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Kumulatif)	rumah budaya	10 (2017)	12		140 - Kementerian Kebudayaan
08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Menurunnya Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim pada Empat Sektor Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan)	01- Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB (%) pada Empat Sektor Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan)	persen	0,995 (2023)	0,275	86.178.930,80	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
08.03.01 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	01 - Peningkatan Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	01- Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil		(indikator baru)	60	1.553.419,10	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
08.03.02 KP: Pengelolaan Sumber Daya Air Adaptif Iklim	01 - Meningkatnya Keakurasian Modifikasi Cuaca	01- Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca	persen	(indikator baru)	84	6.535.494,40	075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
08.03.03 KP: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim	01 - Menurunnya Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian	01- Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB (%) pada Sektor Pertanian	persen	0,248 (2023)	0,187	16.647.597,34	018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
08.03.04 KP: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim	01 - Menurunnya Persentase Kejadian Penyakit Sensitif Iklim	01- Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Sensitif Iklim	persen	(indikator baru)	11	2.419.037,95	024 - Kementerian Kesehatan
08.03.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas untuk Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Meningkatnya Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan iklim	01- Persentase Aksi Pendukung Ketahanan Iklim yang Dilaksanakan di Lokasi Prioritas	persen	0	15	59.023.382,01	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	01 - Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Nasional	01- Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	persen	1,54 (2023)	1,2	1.195.958,30	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.01 KP: Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi	01 - Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana	01- Persentase Daerah yang Memiliki Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Minimal pada Kategori Sedang	persen	62 (2023)	72	50.683,42	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.02 KP: Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana	01 - Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Peringatan Dini dan Keandalan Respon saat Terjadi Bencana	01- Persentase Cakupan Layanan Peringatan Dini di Daerah Berisiko Bencana	persen	6,00	6,17	1.133.004,88	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>TARGET 2026</b>	<b>ALOKASI (RP. JUTA)</b>	<b>INSTANSI KOORDINATOR/PENGAMPU</b>
08.03.03 KP: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim		02- Kecepatan Penyampaian Informasi Peringatan Dini Bencana ke Publik	menit	3	< 3		075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
		03- Persentase Daerah yang Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dan Menerima Intervensi sesuai Standar	persen	75	100		103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.03 KP: Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	01 - Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	01- Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang Ditangani	persen	100	100	0	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.04 KP: Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	01 - Meningkatnya Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana	01- Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak	persen	10,31	10,75	5.770,00	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana	01 - Meningkatnya Infrastruktur Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana	01- Rasio Kabupaten/Kota yang Menerapkan Infrastruktur Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana	persen	0	38	6.500,00	145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

CATATAN:

1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2. Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
3. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman

SK No 154167 C